

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Capaian Kinerja Makro

Tabel 2.1: Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73.81	74.36	0.745
2	Angka Kemiskinan	185.14	189	2.085
3	Angka Pengangguran	6.61	6.1	-7.716
4	Pertumbuhan Ekonomi	9.38	7.73	-17.591
5	Pendapatan Perkapita	5902057086	6413096313	8.659
6	Ketimpangan Pendapatan	0.354	0.37	4.52

Sumber Data: BPS Prov. Sulut

B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ditegaskan antara lain bahwa **Usuran Pemerintahan Daerah (Usuran Konkuren) Terbagi Dalam Dua Usuran, Yaitu Usuran Wajib dan Usuran Pilihan**. Usuran Wajib ini terbagi lagi menjadi Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Usuran Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga masyarakat. Sedangkan Usuran Pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara, baik dalam hal pelaksanaan Usuran Wajib maupun Usuran Pilihan diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016–2021. Adapun hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023 diuraikan dalam tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 2.2: Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1	URUSAN PENDIDIKAN	1) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan	$\frac{77,806}{129,079} \times 100\% = 60.28\%$		
		2) tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	$\frac{1,644}{1,483} \times 100\% = 110.86\%$		
2.	URUSAN KESEHATAN	1) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{1,860}{2,660,415} \times 100\% = 69.91\%$		
		2) Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	$\frac{52}{57} \times 100\% = 91.23\%$		
		3) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	$\frac{5,213}{5,213} \times 100\% = 100\%$		
		4) Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		NILAI Nol dibuktikan dengan surat Keterangan dari OPD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA				SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4				5	6
3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM	1) Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	795					
			92,701	x	100%	=	0.86%	Data Pusat/Kab/Kota
		2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	40					
			117,6	x	100%	=	340136054	Data Pusat/Kab/Kota
		3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	15,864 Ha					
			18,302 Ha	x	100%	=	86.68%	Dinas PU & Penataan Ruang
		4) Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	3					
			3	x	100%	=	100.00%	Bidang Cipta Karya
		5) Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0.06					
			0.06	x	100%	=	100.00%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		CAPAIAN KINERJA				SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3		4				5	6		
		6)	Rasio kemantapan jalan	832,275	km	x	100%	=	83.45%	Dinas PU & Penataan Ruang	Dinas PU & Penataan Ruang
				997,317	km						
		7)	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	131	sertifikat	x	100%	=	6.55%	Dinas PU & Penataan Ruang	Dinas PU & Penataan Ruang
				2,000	sertifikat						
4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	1)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0		x	100%	=	0%	Perkimtan	
				0							
		2)	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	78		x	100%	=	100.00%	Perkimtan	
				78							
		3)	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	0		x	100%	=	0%	Perkimtan	NILAI Nol dibuktikan dengan surat Keterangan dari OPD
				0							
		4)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	200		x	100%	=	0%	Perkimtan	
				200							
5.	URUSAN TRANTIBUM LINMAS	1)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	15		x	100%	=	100%	SATPOL-PP	
				15							
		2)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	7		x	100%	=	100%	SATPOL-PP	
				7							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		3) Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	18		
			18 x 100% = 100%		
		4) Persentase penanganan pra bencana	14	BPBD	Pemasangan Rambu-rambu pada jalur evakuasi, Koordinasi pelaksanaan kesiapsiagaan di Kota Manado, Koordinasi Penanggulangan Bahaya Zoonosis di Kabupaten Bolmong, Bolsel, Bolmut, Minsel, Kota Kotamobagu. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota di Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolmong, Bolsel, Boltim, Kota Kotamobagu, Kab. Kep. Sangihe, kota Tomohon, Kota Bitung.
			15		
		5) Persentase penanganan tanggap darurat bencana	10 x 100% = 100%	SATPOL-PP DAN BPBD	Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		CAPAIAN KINERJA				SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3		4				5	6		
									Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe		
6.	URUSAN SOSIAL	1)	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	195	Anak	x	100%	=	100.00%	Dinsosda dan SIMPD	11 LKS/Panti
				195	Anak						
		2)	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1,220	Anak	x	100%	=	99.51%	Dinsosda	46 LKS/Panti
				1,226	Anak						
		3)	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	264	LU	x	100%	=	100.00%	Dinsosda	10 LKS/Panti
				264	LU						
		4)	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0		x	100%	=	0.00%	Dinsosda	NILAI Nol dibuktikan dengan surat Keterangan dari OPD
				0							
		5)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	9,329	Jiwa	x	100%	=	100.00%	Kab/Kota	
				9,329	Jiwa						
URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
7.	URUSAN TENAGA KERJA	1)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	6	KAB/KOTA	x	100%	=	40%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				15	KAB/KOTA						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		CAPAIAN KINERJA				SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4				5	6	
		2)	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,091	X	100%	=	0.09%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				1,250,948						
		3)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	102,070,948	X	100%	=	8159%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				1,250,948						
		4)	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	10,649.00	X	100%	=	86.11%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				12,367						
		5)	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	7,098	X	100%	=	40%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				17,569						
		6)	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	12,367	X	100%	=	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				12,367						
8.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	1)	Persentase anggaran responsive gender pada belanja APD	Rp 237,427,645,447.00	X	100%	=	16.66%	BKAD dan APBD SKPD yang telah dianalisis melalui GBS	PUG
				Rp 1,424,846,881,522.00						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	PERLINDUNGAN ANAK	2) Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	841 808,069 X 100,000 = 104.08	Data Kasus P2TP2A Sulut dan Sulut Dalam Angka 2020 Hal.87	PA
		3) Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)	360 1,300,185 X 100,000 = 27.69	Data Kasus P2TP2A Sulut dan Sulut Dalam Angka 2020 Hal.87	PP
9.	URUSAN PANGAN	1) Persentase Cadangan Pangan	246,235,76 107,3 X 100% = 229.483,4669152	DINAS PANGAN DAERAH, BPS DAN KAB/KOTA	Jumlah Cadangan Pangan Provinsi x 100 Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi (jumlah penduduk x Konsumsi per kapita pertahun)
10.	URUSAN PERTANAHAN	1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	4,41 111,62 X 100% = 2%	PERKIMTAN	
		2) Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	4,41 111,62 X 100% = 3,95%	PERKIMTAN	
		3) Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	4,41 111,62 X 100% = 3,95%	PERKIMTAN	
11.	URUSAN LINGKUNGAN	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Prov = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air	Surat Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan	Tahun 2020 Perhitungan IKLH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		CAPAIAN KINERJA				SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4				5	6
	HIDUP		Provinsi	IKU= Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut $IKLH = (0.340 \times 48,24) + (0.428 \times 92,41) + (0.133 \times 61,89) + (0.099 \times 82,65)$ 73,87				Kehutanan S.318/PPKL/SPT/REN.0/12/2020	Berbeda dengan Tahun 2019 karena sudah bertambah dengan Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
		2)	Tingkat Ketaatan Penanggun jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10				UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan pengelolaan LH Pasal 74	
				16	X	100%	= 63%		
12.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1)	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 Tahun	2				BIDANG DUKCAPIL	DINAS DUKCAPIL
				2	X	100%	= 100%		
		2)	Pemanfaatan Data Kependudukan	15				BIDANG DUKCAPIL	DINAS DUKCAPIL
				15	X	100%	= 100%		
13.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1)	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	25				Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota	DINAS PMD
				37	X	100%	= 67.57%		
		2)	Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri	407				Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota	DINAS PMD
				679	X	100%	= 59.94%		
14.	URUSAN PENGENDALIAN PEDUDUK DAN KB	1)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.36				Radalgram BKKBN	DINAS DUKCAPIL

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		2) Presentasi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate) / Mcpr	$\frac{194,046}{310,491} \times 100\% = 62.50\%$	Radalgram BKKBN	DINAS DUKCAPIL
		3) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{54,364}{310,491} \times 100\% = 17,50\%$	Radalgram BKKBN	DINAS DUKCAPIL
15.	URUSAN PERHUBUNGAN	1) Rasio Konektivitas Provinsi	$K1 = 125 \times 0.5 / 127 = 0.437$ $IK2 = (8 \times 0,8) = 0.35$ $Rasio\ Konektifitas\ Provinsi =$ $= (0,437 \times 0,7) + (0,35 \times 0,3)$ $= 0,3059 + 0,105$ $= 0,410$ Ratio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) - IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pada provinsi X bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) - IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut X bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)	Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP	
		2) V/C ratio di Jalan Provinsi (Teknis)	Kinerja Ruas Jalan = $\frac{Volume}{Kapasitas\ Jalan}$ Kapasitas Jalan = 0,7 Cat. Semakin Rendah Nilai Semakin Baik Kinerja ruas jalan	Hasil Survey Ruas Jalan Provinsi	
16.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{47}{47} \times 100\% = 100.00\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA				SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4				5	6
		2) Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	70 79	X	100%	=	88.61%	
		3) Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	2,047,341 2,659,543	X	100%	=	77%	
17.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	3,353 6,702	X	100%	=	50.03%	
		2) Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	218,123 229,808	X	100%	=	94.92%	
18.	URUSAN PENANAMAN MODAL	1) Persentase peningkatan investasi di Provinsi Sulawesi Utara	4,161,618,843,699 6,550,772,906,301	X	100%	=	63.53%	
19.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	260,985 869,95	X	100%	=	30%	DISPORA Tidak ada data karena tidak ada kegiatan
		2) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	92 621,630	X	100%	=	0,014%	DISPORA Tidak ada data karena tidak ada kegiatan
		3) Peningkatan Prestasi Olahraga	26					DISPORA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
20.	URUSAN STATISTIK	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	46 X 100% = 100%	DISKOMINFO	
		2) Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	46 X 100% = 100%	DISKOMINFO	
21.	URUSAN PERSANDIAN	1) Tingkat keamanan informasi pemerintah	14,3 5 X 100% = 286	DISKOMINFO	
22.	URUSAN KEBUDAYAAN	1) Terlestarikannya Cagar Budaya	1 1 X 100% = 100%	DINAS KEBUDAYAAN	
23.	URUSAN PERPUSTAKAAN	1) Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	61,83%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,01%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
24.	URUSAN KEARSIPAN	1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan ertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	44,17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) / 6$ $T = 0$	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
URUSAN PILIHAN					
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	$\frac{859,379,02}{988,400} \times 100\% = 86,94\%$		
		2) Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	96,78%		
2	URUSAN PARIWISATA	1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{62.355}{28.316} \times 100\% = 220\%$	DINAS PARIWISATA	
		2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$\frac{140.618}{603.37} \times 100\% = 23\%$	DINAS PARIWISATA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		CAPAIAN KINERJA				SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4				5	6	
		3)	Tingkat hunian akomodasi	2.481	X	100%	=	42%	DINAS PARIWISATA	
				5.851						
		4)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0	X	100%	=	0%	DINAS PARIWISATA	
				0						
3	URUSAN PERTANIAN	1)	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1,953,018	X	100%	=	580.1265276		
				336,653,8						
		2)	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	260	X	100%	=	-80.25%		
				324						
4	URUSAN KEHUTANAN	1)	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	60	X	100%	=	100%		
				60						
		2)	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	192,914,86	X	100%	=	25,22		
				764,739						
		3)	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	8,519	X	100%	=	3%		
				289,782						
5	URUSAN Energi dan Sumber Daya Mineral	1)	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	98	X	100%	=	100%		
				98						
		2)	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	1,827	X	100%	=	99%		
				1,839						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		CAPAIAN KINERJA				SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4				5	6
6	URUSAN PERDAGANGAN	1)	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-31155 1,120,38	X	100%	=	100%	
		2)	Persentase penanganan pengaduan konsumen	2 2	X	100%	=	100%	
		3)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	7 7	X	100%	=	100%	
		4)	Tertib Usaha	0 0	X	100%	=	0%	NILAI Nol dibuktikan dengan surat Keterangan dari OPD
		5)	Persentase kinerja realisasi pupuk	31,462,8 131,043,01	X	100%	=	24,00%	
		6)	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	18 18	X	100%	=	100%	
		7)	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,54%					
7	URUSAN PERINDUSTRIAN	1)	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	0 0	X	100%	=	0%	NILAI Nol dibuktikan dengan surat Keterangan dari OPD
		2)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0%					NILAI Nol dibuktikan dengan surat Keterangan dari OPD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		NILAI Nol dibuktikan dengan surat Keterangan dari OPD
		4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		NILAI Nol dibuktikan dengan surat Keterangan dari OPD
		5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$		NILAI Nol dibuktikan dengan surat Keterangan dari OPD
		6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0%		
8	URUSAN	1)	$0 \times 100\% = 0\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	TRANSMIGRASI		0		
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1) Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	480,602,498,646 3,358,663,215,088 X 100% = 14%		
		2) Rasio PAD	1,624,996,697,596 25,623,751,000,000 X 100% = 6%		
		3) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	2,083,427,824,058 3,858,758,102,783,8 X 100% = 53,99%		
		4) Opini Laporan Keuangan	100		
		5) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,038		
		6) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3		
2	URUSAN PENGADAAN	1) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 110 X 100% = 0%		
		2) Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	5,172 5,725 X 100% = 90%		
		3) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui	670,310,031,681,89 1,428,193,159,725 X 100% = 46,93%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			pengadaan		
		4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{10,700,753,075}{553,145,833,505} \times 100\% = 2\%$		
3	URUSAN KEPEGAWAIAN	1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{11136}{1184} \times 100\% = 9,40\%$		
		2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{771}{4651} \times 100\% = 0.16\%$		
		3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{5757}{771} \times 100\% = 7,46\%$		
4	URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN	1) Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{3,358,663,215,088}{3,813,842,299,943} \times 100\% = 88\%$		
		2) Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{1,454,095,655,035}{1,624,996,697,596} \times 100\% = 89\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		3) Assets management	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Yak)		
		4) Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{253,121,347,252,89}{4,167,727,804,692} \times 100\% = 6.07\%$		
5	URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	$\frac{\text{Rp. 14.310.020.948}}{\text{Rp. 14.313.734.334}} \times 100\% = 100\%$		

Tabel 2.3: Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
1	URUSAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan	1)	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	121		
			2)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	63.384		
			3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	45.618		
			4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	63.384		
			5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	45618		
			6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	856		
			7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	860		
			8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	4569		
			9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	3991		
			10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	620		
			11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	942		
			12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	926		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		6	7
			13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (negeri dan swasta)	725		
			14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	725		
			15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1811		
			16) Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	189		
			17) Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	140		
			18) Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2		
			19) Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1		
			20) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1		
			21) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	58		
		tingkat partisipasi warga negara usia 4-	1) Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	28		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
		18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	2}	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1644		
			3)	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1644		
			4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	24		
			5)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	290		
			6)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	24		
			7)	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	60		
			8)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	92		
			9)	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	22		
			10)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	9		
2	URUSAN KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1)	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	57 RS	Bidang Yankes	
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1 RS	Bidang Yankes	
		Persentase pelayanan kesehatan	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Rp. 100,000,000	Dinas Kesehatan Daerah Prov Sulut	Realisasi per 31 Des 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4			6	7		
		bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	2}	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	6	Dinas Kesehatan Daerah Prov Sulut	kantor Dinkesdaprov, kantor gubernur, kantor BPBD, mobile, PSC 119, bandara Sam Ratulangi Manado, pelabuhan Manado, pelabuhan Bitung, Bapelkes Manado, kantor Badan Diklat Watutumou, kantor Pusat Krisis Kesehatan Manado		
			3)	Jumlah SDM Kesehatan di Pos Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			17 Orang	Dinas Kesehatan Daerah Prov Sulut	
			4)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			36 Orang		SK Kepala Dinas Kesehatan Daerah no. 821/SK/Dinkes/642/IV/2020 tgl 1 April 2020
			5)	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana			26 Kali		Seksi Promkes
		Persentase pelayanan kesehatan	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Rp. 2,099,664,036	Dinas Kesehatan Daerah Prov Sulut			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
		bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	2}	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	Tim Gerak Cepat (TGC) terdiri atas beberapa Lintas Sektor Yakni:1. Bidang Kesmas;2. Bidang SDK;3. Bidang Pelayanan Medik BLU RSUP Prof Kandou;4. Bidang Pelayanan Medik RSU Ratumbuang;5. KKP Kelas III Bitung;6. BTKL Manado;7. BPOM Manado;8. UPTD Labkesda Prov Sulut;9. KKP Kls III Bitung;10. RSUD Noongan;11. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan dan Kedaruratan Terpadu Prov Sulut;12. Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkesda;13. Seksi P2PM dan KK Dinkesda Prov Sulut;14. Instalasi Laboratorium BLU RSUP Prof. Kandou.	Dinas Kesehatan Daerah Prov Sulut	SK Kepala Dinas Kesehatan Prov Sulut Nomor: 188.4/SK.Dinkes/5556/VIII/2017
			3)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	1	Dinas Kesehatan Daerah Prov Sulut	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	927.01		
			2}	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	595.5	Data Pusat/Kab/ Kota	Data Pusat/Kab/ Kota
			3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	117.6	Data Pusat/Kab/ Kota	Data Pusat/Kab/ Kota

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
			4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	1.176	Data Pusat/Kab/ Kota	Data Pusat/Kab/ Kota
			5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan	0 Ha	Dinas PU & Penataan Ruang	Data Pusat/Kab/ Kota
			6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	0 Ha	Dinas PU & Penataan Ruang	Data Pusat/Kab/ Kota
			7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	0	Data Pusat/Kab/ Kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah: i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m)
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi,	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)		Data Pusat/Kab/ Kota	Data Pusat/Kab/ Kota
			2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)		Data Pusat/Kab/ Kota	Data Pusat/Kab/ Kota

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
		dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		Data Pusat/Kab/ Kota	Data Pusat/Kab/ Kota
			4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)			Data Pusat/Kab/ Kota
			5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi		Dinas PU & Penataan Ruang	WS Kewenangan Provinsi
			6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi		Dinas PU & Penataan Ruang	WS Kewenangan Provinsi
			7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi		Data Pusat/Kab/ Kota	Data Pusat/Kab/ Kota
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	40	Dinas PU & Penataan Ruang	
			2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	36	Dinas PU & Penataan Ruang	
			3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	54	Dinas PU & Penataan Ruang	
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1	Dinas PU & Penataan Ruang	Belum Dilaksanakan
			2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	1	Dinas PU & Penataan Ruang	Belum Dilaksanakan
			3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	1 UPTD AIR MINUM DPUPRD PROV SULUT	Dinas PU & Penataan Ruang	
			4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PU & Penataan Ruang	
			5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	Dinas PU & Penataan Ruang	
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL	1)	Jumlah SPALD Regional	0	Dinas PU & Penataan Ruang	
			2)	Total kapasitas SPALD Regional	0	Dinas PU & Penataan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
		Regional				Ruang	
			3)	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0	Dinas PU & Penataan Ruang	
			4)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	0	Dinas PU & Penataan Ruang	
			5)	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	0	Dinas PU & Penataan Ruang	
		Rasio kemantapan jalan	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	997.317	Dinas PU & Penataan Ruang	
			2)	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	0	Dinas PU & Penataan Ruang	Rencana per Ruas Jalan
			3)	Panjang jalan yang dibangun	0.15	Dinas PU & Penataan Ruang	Capaian Kinerja dihitung sesuai ruas jalan yang masuk dalam SK Gub No 135 tahun 2018
			4)	Panjang jembatan yg dibangun	10 Meter	Dinas PU & Penataan Ruang	
			5)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	7.566 KM	Dinas PU & Penataan Ruang	
			6)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	Dinas PU & Penataan Ruang	
			7)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	7.566 KM	Dinas PU & Penataan Ruang	Capaian Kinerja dihitung sesuai ruas jalan yang masuk dalam SK Gub No 135 tahun 2018
			8)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	11	Dinas PU & Penataan Ruang	
			9)	Panjang jalan yang dipelihara	70.16 KM	Dinas PU & Penataan Ruang	Capaian Kinerja dihitung sesuai ruas jalan yang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
							masuk dalam SK Gub No 135 tahun 2018
			10)	Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dinas PU & Penataan Ruang	
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	4		Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			2)	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	131 ORANG	Data Akhir Tahun 2019 Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	131 ORANG	Data Akhir Tahun 2019 Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1	Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	1	Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	1	Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			8)	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	1 UPTD BINA TEKNIK DPUPRD PROV SULUT	Dinas PU & Penataan Ruang	
			9)	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan	1	Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				Pelatihan Kerja (LPKK)			
			10)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1	Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1	Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			12)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ADA	Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			13)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ADA	Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
			14)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ADA	Dinas PU & Penataan Ruang	Tidak di laksanakan dikarenakan Pandemic
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	100		
			2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	298		
			3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	740		
			4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
			5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
			6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
			7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				tempat tinggal sementara korban bencana			
			8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
			9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	78	PERKIMTAN	
			2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PERKIMTAN	
			3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	45		
			4)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1)	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15Ha	0	KOTAKU APBN	
			2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0		
			3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0		
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1)	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	200	PERKIMTAN	
			2)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
			3)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0		
			4)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
5	URUSAN TRANTIBUM LINMAS	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	12	SATPOL-PP	
			2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	SATPOL-PP	
			3)	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	100%	SATPOL-PP	Dokumen Daftar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
							Aset
			4)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3	SATPOL-PP	1. Perda no.2 tahun 2014 2. Pergub no.3 tahun 2014
			5)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	SATPOL-PP	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan Staf Pelaksanan
			6)	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	9	SATPOL-PP	Sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	1)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	BPBD	
			2)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1	BPBD	
			3)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	1	BPBD	
		Persentase penanganan pra bencana	1)	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	4	BPBD	
			2)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	1	BPBD	
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	1)	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	1	BPBD	Kaji Cepat bencana banjir bandang di Kecamatan Manganitu dan Tamako Kab. Kep. Sangihe, Kaji cepat di Kabupaten Bolmut bencana

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
							abrasi pantai, Kaji cepat bencana pandemi virus covid 19 di Kab. Boltim, Kaji Cepat bencana tanah longsor di Desa Sampiro Kec.Sangkub Kabupaten Bolmut, Kaji Cepat di Kabupaten Bolsel bencana tanah longsor
			2)	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	1	BPBD	(SATPOL-PP) Kab.Bolaang Mongondow utara – Banjir; Kota Manado - Banjir; (BPBD)Respon cepat bencana banjir bandang di Kecamatan Manganitu dan Tamako Kab. Kep. Sangihe, Respon cepat di Kabupaten Bolmut bencana abrasi pantai, Respon cepat bencana pandemi virus covid 19 di

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
							Kab. Boltim, Respon cepat bencana tanah longsor di Desa Sampiro Kec. Sangkub Kabupaten Bolmut, Respon cepat di Kabupaten Bolsel bencana tanah longsor
			3)	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1	SATPOL-PP DAN BPBD	(SATPOL-PP) Kab.Bolaang Mongondow utara – Banjir; Kota Manado - Banjir; (BPBD) Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Bolaang Mongondow Selatan
			4)	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	1	BPBD	
6	URUSAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	195 Orang	Dinsosda 2020	
			2)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	175 Orang	Dinsosda 2020	
			3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	11 gedung	Dinsosda 2020	
			4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	84 paket	Dinsosda 2020	
			5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam	21 paket	Dinsosda 2020	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		6	7
			panti			
			6) Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	38 orang	Dinsosda 2020	
			7) Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan ksehatan) yang disediakan di dalam panti	21 orang	Dinsosda 2020	
			8) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	11 orang	Dinsosda 2020	
			9) Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	11 kali/minggu	Dinsosda 2020	
			10) Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	39 kali	Dinsosda 2020	
			11) Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	29 orang	Dinsosda 2020	
			12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	28 orang	Dinsosda 2020	
			13) Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	175 orang	Dinsosda 2020	
			14) Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	5 orang	Dinsosda 2020	
			15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	5 orang	Dinsosda 2020	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1) Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	1220 anak	Dinsosda 2020	
			2) Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	1220 anak	Dinsosda 2020	
			3) Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	90	Dinsosda 2020	
			4) Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	45	Dinsosda 2020	
			5) Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	46	Dinsosda 2020	
			6) Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			7) Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	46	Dinsosda 2020	
			8) Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis)	0	Dinsosda 2020	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		6	7
			yang disediakan di dalam panti			
			9) Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	14	Dinsosda 2020	
			10) Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	46	Dinsosda 2020	Masing-Masing Panti
			11) Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	45	Dinsosda 2020	Masing-Masing Panti
			12) Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	45	Dinsosda 2020	
			13) Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	1045 Anak	Dinsosda 2020	
			14) Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	45 Anak	Dinsosda 2020	
			15) Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	649 Anak	Dinsosda 2020	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1) Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	264 LU	Dinsosda 2020	
			2) Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	55 LU	Dinsosda 2020	
			3) Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	15 wisma	Dinsosda 2020	
			4) Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	20 Alat bantu	Dinsosda 2020	
			5) Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	11 Paket	Dinsosda 2020	
			6) Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			7) Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	11 paket	Dinsosda 2020	Masing-Masing Panti
			8) Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinsosda 2020	kerjasama dgn puskes terdekat
			9) Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2 Org Lansia	Dinsosda 2020	tidak ada

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
			10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	11 paket	Dinsosda 2020	Masing-Masing Panti
			11)	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan didalam panti	10 orang	Dinsosda 2020	
			12)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	209 orang	Dinsosda 2020	
			13)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	11 Org	Dinsosda 2020	Tidak Ada
			14)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	11 Org	Dinsosda 2020	Tidak Ada
			15)	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	2 Org	Dinsosda 2020	Tidak Ada
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	0	Dinsosda 2020	
			2)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	0	Dinsosda 2020	
			4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			9)	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			11)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat	0	Dinsosda 2020	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				bimbingan keterampilan dasar			
			12)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	0	Dinsosda 2020	
			13)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	0	Dinsosda 2020	
			14)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	0	Dinsosda 2020	
			15)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	0	Dinsosda 2020	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	1)	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	9329 jiwa	Dinsosda 2020	
			2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1500	Dinsosda 2020	
			3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	7	Dinsosda 2020	
			4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	150	Dinsosda 2020	
			5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	350 Jiwa	Dinsosda 2020	
			6)	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	961 Orang	Dinsosda 2020	Tagana & Pelopor Perdamaian
			URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
7.	TENAGA KERJA	(Outcome) Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja provins	2	sesuai undang-undang no.13 thn 2003 tentang Ketengakerjaan, serta dasar Hukum Penyusunan RTK dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.16/MEN/XI/2010	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				kerja			Kerja 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
			3)	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	20 PERUSAHAAN	DISNAKERTRANS	
			4)	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	15 KABUPATEN/KOTA	DISNAKERTRANS	
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNi/okupasi	100	DISNAKERTRANS	
			2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	DISNAKERTRANS	
			3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	2.58	DISNAKERTRANS	
			4)	Persentase penganggur yang dilatih	0.72	DISNAKERTRANS	
			5)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	59.55	DISNAKERTRANS	
			6)	Persentase penyerapan lulusan	36.25	DISNAKERTRANS	
			7)	Persentase LPK yang terakreditasi	60	DISNAKERTRANS	
			8)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	100	DISNAKERTRANS	
			9)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	6 PEKERJA	DISNAKERTRANS	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	DISNAKERTRANS	
			2)	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan		DISNAKERTRANS	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	19		
			3)	Data tingkat produktivitas total	0		
			1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	5.67	DISNAKERTRANS	
			2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	0.63	DISNAKERTRANS	
			3)	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	24.837 ORANG	DISNAKERTRANS	
			4)	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	5.67	DISNAKERTRANS	
			5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	86.11	DISNAKERTRANS	
			6)	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	4.85	DISNAKERTRANS	
			7)	Presentase Jumlah Perusahaan yang berselisih	1.6	DISNAKERTRANS	
			8)	Jumlah mogok kerja	0	DISNAKERTRANS	
			9)	Jumlah penutupan perusahaan	0	DISNAKERTRANS	
			10)	Jumlah perselisihan kepentingan	7 KASUS	DISNAKERTRANS	
			11)	Jumlah perselisihan hak	67	DISNAKERTRANS	
			12)	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0	DISNAKERTRANS	
			13)	Jumlah perselisihan PHK	123 KASUS	DISNAKERTRANS	
			14)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	264 ORANG	DISNAKERTRANS	Sektor

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
							Perdagangan Jasa dan Investasi 13 Orang; Sektor Keuangan 2 Orang; Sektor Pertambangan 2 Orang; Sektor Pertanian/Pertambangan 31 Orang; Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 1 Orang; serta, ektor Aneka Industri dan Industri Dasar Kimia 7 Orang.
			15)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	52	DISNAKERTRANS	
			16)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	1	DISNAKERTRANS	3 Wilayah (Provinsi, Bitung, Kotamobagu)
			17)	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	2	DISNAKERTRANS	SK GUBERNUR NO. 400 TAHUN 2022 TANGGAL 28 NOVEMBER 2022
			18)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	64.8	DISNAKERTRANS	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
		kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi - Penjelasan IKK Outcome		Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi			
			2)	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0	DISNAKERTRANS	
			3)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	7098 Orang	DISNAKERTRANS	
			4)	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	8947 Orang	DISNAKERTRANS	
			5)	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	29 Orang	DISNAKERTRANS	
			6)	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	18 Pejabat	DISNAKERTRANS	
			7)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	DISNAKERTRANS	
			8)	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	1 LEMBAGA	DISNAKERTRANS	
			9)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	503	DISNAKERTRANS	
			10)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	32.42	DISNAKERTRANS	
			11)	Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	100	DISNAKERTRANS	
			12)	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	100	DISNAKERTRANS	
		Persentase	1)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan	123 PERUSAHAAN	LAP TAHUNAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
		perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan		berserikat			
			2)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	1045 PERUSAHAAN	Laporan Tahunan Buku Register P2k3 Buku Uji Riksa	
			3)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	1168 PERUSAHAAN	LAP TAHUNAN	
			4)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	3045 PERUSAHAAN	DISNAKERTRANS	
			5)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	5259 Perusahaan	DISNAKERTRANS	
			6)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	205 PERUSAHAAN	DISNAKERTRANS	
			7)	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	0	DISNAKERTRANS	
			8)	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	12,367	WLK ONLINE S/D TAHUN 2020	
8.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	30		
			2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	30	BIDANG PUG	
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1 MEDIA ONLINE	BIDANG PK-PHA	Komisi Penyiaran Indonesia (KPID)
			2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 LEMBAGA	BIDANG PK-PHA	UPTD PPA Prov. Sulut
			3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	P2TP2A	
			4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	10	BIDANG PK-PHA	
			5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	9	BIDANG PK-PHA	UPTD PPA Prov. Sulut

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	1)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program	0	0
			2)	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan yang telah Terstandarisasi di Provinsi Sulawesi Utara	1 LEMBAGA	DPP-PAD	UPTD PPA Prov. Sulut
			3)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100		Aplikasi SIMFONI PPA
			4)	Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang mendapat pelatihan	13	0	0
			5)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/failitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Provinsi)	0	DPP-PAD	UPTD PPA Prov. Sulut
9.	URUSAN PANGAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	1)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	2	AGREGASI KAB/KOTA	Gudang Cadangan Pangan dan Sarana Pendukung Lainnya Kec. Marore Kab. Kepl. Sangihe Kec. Miangas Kab. Kepl. Talaud
			2)	Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya	1		Untuk tahun 2021 ada Penyaluran pangan Pokok dan Pangan lainnya
			3)	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	1	DINAS PANGAN DAN BPS	CADANGAN BERAS PEMERINTAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
							PROVINSI
							CADANGAN BERAS TOTAL PROVINSI
			4)	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	0		
			5)	Terpromosikannya target pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	1		
			6)	Tersediannya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	1		peta ketahanan dan kerentanan pangan
			7)	Tersediannya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1		system kewaspadaan pangan dan gizi
			8)	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	21		
			9)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	1		penyaluran cadangan pangan sebesar 37.194,33 Kg
			10)	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar dipasar	4	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	dokumen Registrasi dan Sertifikat pangan segar (Tahun 2021 ada 116 HC)
10.	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin	1	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	100		
			2	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100		
			3	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
		lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	4	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	100		
11.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1)	Hasil Perhitungan Provinsi Terhadap :		Surat Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan S.318/PPKL/SPT/REN. 0/12/2020	Tahun 2020 Perhitungan IKLH Berbeda dengan Tahun 2019 karena sudah bertambah dengan Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Data ini di dapat dari Dinas Kehutanan
				a. Indeks Kualitas Air (IKA)	52		
				b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	94		
				c. Indeks Tutupan Lahan (ITH)	62		
		Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1)	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	73	DLHD	Untuk Penerbitan Izin Lingkungan hanya dikeluarkan oleh Dinas PTSP untuk DLH hanya mengeluarkan pertimbangan Teknis
			2)	Rasio Pejabat Pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha Yang Izin Lingkungan, Izi PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi	17	SK Gubernur Sulawesi Utara No. 75 Tahun 2015 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi	Untuk Penerbitan Izin Lingkungan hanya dikeluarkan oleh Dinas PTSP untuk DLH hanya mengeluarkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
						Sulawesi Utara	pertimbangan Teknis
			3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	TIDAK ADA DATA	DLHD	Tidak ada data dikarenakan MHA baru pada Tahap Identifikasi/ Verifikasi
			4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	TIDAK ADA DATA	DLHD	Tidak ada data dikarenakan MHA baru pada Tahap Identifikasi/ Verifikasi
			5)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	TIDAK ADA DATA	DLHD	Tidak ada data dikarenakan MHA baru pada Tahap Identifikasi/ Verifikasi
			6)	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	64	UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan pengelolaan LH Pasal 74	
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 Tahun	1)	Fasilitasi Pelayanan Adminduk	15		
		Pemanfaatan Data Kependudukan	1)	Fasilitasi Pelayanan Adminduk			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
13.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	1)	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kerjasama antar desa	3	DINAS PMD	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama
			2)	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa sebelumnya	3	DINAS PMD	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama
			3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	9	DINAS PMD	Bantuan UP2K untuk lembaga PKK
			4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	DINAS PMD	
		Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1)	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kerjasama antar desa		DINAS PMD	
			2)	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa sebelumnya		DINAS PMD	
			3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang 4terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		DINAS PMD	Bantuan UP2K untuk lembaga PKK
			4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		DINAS PMD	
14.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	TFR (Angka Kelahiran Total)	1)	Tersedianya Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-PERDAkan	1		DISDUKCAPIL
			2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh	1	BKKBN	DISDUKCAPIL

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
	KB			wanita umur 25-49 Tahun			
			3)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	39.6	Radalgram BKKBN	DISDUKCAPIL
			4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	79.43	BKKBN	DISDUKCAPIL
			5)	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Porgram KKBPK	22		DISDUKCAPIL
		Presentasi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate) / Mcpr	1)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	78.74	Radalgram BKKBN	DISDUKCAPIL
			2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1765%	Radalgram BKKBN	DISDUKCAPIL
			3)	Pemerintah Daerah Kab./Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	15		DISDUKCAPIL
			4)	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	100		DISDUKCAPIL
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	50		DISDUKCAPIL
			2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	50.39		DISDUKCAPIL
15.	URUSAN PERHUBUNGAN	Rasio Konektivitas Provinsi	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	100		
			2)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	10000%		
		V/C RATIO di jalan provinsi	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	40		
16.	URUSAN KOMUNIKASI	Persentase Organisasi Perangkat	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang	100	COMMAND CENTER/ DISKOMINFO	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		6	7
	DAN INFORMATIKA	Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
			2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	COMMAND CENTER/DISKOMINFO	
			3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	COMMAND CENTER/DISKOMINFO	
		Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	100	COMMAND CENTER/DISKOMINFO	
			2) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	COMMAND CENTER/DISKOMINFO	
			3) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan	100	COMMAND CENTER/DISKOMINFO	
			4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	COMMAND CENTER/DISKOMINFO	
			5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	COMMAND CENTER/DISKOMINFO	
			6) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	COMMAND CENTER/DISKOMINFO	
			7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	88	COMMAND CENTER/DISKOMINFO	
			8) Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan	100	COMMAND CENTER/	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				pusat data pemerintah		DISKOMINFO	
			9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	COMMAND CENTER/ DISKOMINFO	
			10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	COMMAND CENTER/ DISKOMINFO	
			11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	COMMAND CENTER/ DISKOMINFO	
			12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	42.55	COMMAND CENTER/ DISKOMINFO	
			13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0	COMMAND CENTER/ DISKOMINFO	
			14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1.	COMMAND CENTER/ DISKOMINFO	
		Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	COMMAND CENTER/ DISKOMINFO	
			2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	COMMAND CENTER/ DISKOMINFO	
			3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	COMMAND CENTER/ DISKOMINFO	
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1	DINAS KOPERASI	
			2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan	1	DINAS KOPERASI	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
			3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	80	Bidang Pengawasan/ DINAS KOPERASI	Target tahun 2020 sebanyak 6 koperasi
			4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	39.13	DINAS KOPERASI	
			5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	35.08	Sekretariat dan Balatkop	Target tahun 2020 sebanyak 12 koperasi
			6)	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1.11	Sekretariat dan Balatkop	Target tahun 2020 sebanyak 360 orang
			7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		BELUM PERNAH
			8)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	78.55	Data ODS Koperasi Per 31-12-2021	15/166X100=9,04 atau(9%) Dihitung Jlh Sertifikat NIK Per Jlh Koperasi Aktif
			9)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah	0	DINAS KOPERASI	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				provinsi			
			10)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	DINAS KOPERASI	
			11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Data ODS Koperasi Per 31-12-2021	Jlh Koperasi Aktif Per Jlh Total Koperasi
			12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	DINAS KOPERASI	
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	1.3	DINAS KOPERASI	
			2)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	49.52	DINAS KOPERASI	Belum pernah input
			3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		DINAS KOPERASI	
			4)	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	63.49	Bidang usaha Pembiayaan	Target tahun 2020 sebanyak 238 UMKM
			5)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	47.9	DINAS KOPERASI	
			6)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	72.9	Bidang usaha Pembiayaan	Target tahun 2020 sebanyak 238 UMKM
			7)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	45	Sekretariat dan Balatkop	Target tahun 2020 sebanyak 405 UMKM
18.	URUSAN	Persentase	1)	PERDA mengelai pemberian fasilitas/insentif penanaman	1	BIDANG	Dampak dari

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
	PENANAMAN MODAL	peningkatan investasi di Provinsi Sulawesi Utara		modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		PENGEMBANGAN DPM-PTSP	refocusing anggaran tahun 2020 sehingga belum bisa terlaksana
			2)	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	BIDANG PENGEMBANGAN DPM-PTSP	Dilakukan sesuai keadaan dan kebutuhan dibidang masing-masing
			3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	BIDANG PENGEMBANGAN DPM-PTSP	Dampak dari refocusing anggaran tahun 2020 sehingga belum bisa terlaksana
			4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	6	BIDANG PERIZINAN DPM-PTSP	Dilakukan sesuai keadaan dan kebutuhan dibidang masing-masing
			5)	Kegiatan pameran penanaman modal	2	BIDANG PROMOSI DPM-PTSP	Dampak dari refocusing anggaran tahun 2020 sehingga belum bisa terlaksana
			6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	3	BIDANG PROMOSI DPM-PTSP	Dampak dari refocusing anggaran tahun 2020 sehingga

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
							belum bisa terlaksana
			7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	444	BIDANG PERIZINAN DPM-PTSP	Dampak dari refocusing anggaran tahun 2020 sehingga belum bisa terlaksana
			8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	26.154	BIDANG PERIZINAN DPM-PTSP	Penerbitan perizinan dan non perizinan yang adalah wewenang provinsi sesuai dengan bidangnya: 111 BIDANG ESDM; 62 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP; 47 BIDANG PUPR; 3 BIDANG SOSIAL; 33 BIDANG KESEHATAN; 13 BIDANG TENAGA KERJA; 6 BIDANG PERTANAHAN; 4 BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
							MASYARAKAT; 980 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN; 103 BIDANG PERHUBUNGAN; 97 BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN; 2 BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN; DAN 3 BIDANG KEHUTANAN.
			9)	Laporan realisasi penanaman modal	48	BIDANG PENGENDALIAN DAN BKPM RI	Realisasi berdasarkan laporan LKPM Online yang dikeluarkan oleh BKPM RI selang tahun 2020 dan diolah di Bidang Pengendalian
			10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota	3	BIDANG PENGENDALIAN DPM-PTSP	Dampak dari refocusing anggaran tahun 2020 sehingga belum bisa terlaksana
			11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	9	BIDANG	Dampak dari

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
						PENGENDALIAN DPM-PTSP	refocusing anggaran tahun 2020 sehingga belum bisa terlaksana
			12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	0	BIDANG PERIZINAN DPM-PTSP	Dampak dari refocusing anggaran tahun 2020 sehingga belum bisa terlaksana
19.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	DISPORA	TIDAK ADA KEGIATAN
			2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	DISPORA	TIDAK ADA KEGIATAN
			3)	jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	DISPORA	TIDAK ADA KEGIATAN
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	21	DISPORA	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	8	DISPORA	
			2)	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	31	DISPORA	
			3)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	DISPORA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				kepramukaan	71		
			5)	jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisa	1	DISPORA	
20.	URUSAN STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1)	Tersedianya buku profil daerah	1	DISKOMINFO	Buku Sulut Dalam Angka tahun 2022
			2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	47	DISKOMINFO	
			3)	Jumlah komplikasi statistik sektoral yang dilakukan	104	DISKOMINFO	
			4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	7	DISKOMINFO	
			5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2	DISKOMINFO	
			6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100	DISKOMINFO	
			7)	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	DISKOMINFO	
21.	URUSAN PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	KOMINFO	
			2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	217	KOMINFO	
			3)	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	45.436	KOMINFO	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
			4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	KOMINFO	
22.	URUSAN KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	26	DINAS KEBUDAYAAN	
			2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	26	DINAS KEBUDAYAAN	
			3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	26	DINAS KEBUDAYAAN	
			4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	2	DINAS KEBUDAYAAN	
			5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	1	DINAS KEBUDAYAAN	
			6)	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	1	DINAS KEBUDAYAAN	
			7)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2	DINAS KEBUDAYAAN	
			8)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	1	DINAS KEBUDAYAAN	
			9)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	1	DINAS KEBUDAYAAN	
			10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	3705	DINAS KEBUDAYAAN	
			11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses	8,196	DINAS KEBUDAYAAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum			
			12)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DINAS KEBUDAYAAN	
			13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	10	DINAS KEBUDAYAAN	
			14)	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	30	DINAS KEBUDAYAAN	
			15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	30	DINAS KEBUDAYAAN	
			16)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	2	DINAS KEBUDAYAAN	
			17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuma	2	DINAS KEBUDAYAAN	
			18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1	DINAS KEBUDAYAAN	
			19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	6	DINAS KEBUDAYAAN	
23.	URUSAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2.783	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			2)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0.307	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.001	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1.486	DINAS PERPUSTAKAAN DAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
						KEARSIPAN	
			5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			6)	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			7)	Jumlah judul yang tercantum dalam Katalog Induk Daerah	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			8)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam Katalog Induk Daerah	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			9)	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam Bibliografi Daerah	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi) terdaftar yang ada di wilayahnya	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			2)	Jumlah Naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
24	URUSAN KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	87.28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			2)	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	89.41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
		ertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			URUSAN PILIHAN				
			1)	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal	805		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		6	7
			perikanan berukuran 5 - 30 GT			
			3) Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	50		
			4) Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	124		
			5) Jumlah kapal yang terdaftar	629		
			6) Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	182		
			1) Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	20.91		
			2) Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	3		
			3) Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	805		
			4) Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	182		
			5) Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	116		
			6) Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	12		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
			7)	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	54		
			8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	13		
26	PARIWISATA		1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	0		
			2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0		
			3)	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	0		
			4)	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	0		
			5)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	0		
			6)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	0		
			7)	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	0		
			8)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0		
			9)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	0		
			10)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
			11)	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0		
			12)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0		
			13)	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0		
			14)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0		
			15)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0		
27	PERTANIAN		1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	509		
			2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	33		
			3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	53		
			4)	Prasarana pertanian yang digunakan	9		
			5)	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	273652		
			6)	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	1935		
			7)	Penerbitan izin usaha pertanian	0		
			8)	Persentase sarana pertanian yang digunakan	9		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
			9)	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	4.5		
			10)	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	0		
28	KEHUTANAN		1)	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	0		
			2)	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	83.33		
			3)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	8519		
			4)	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	3310		
			5)	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	25.23		
			6)	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	100		
			7)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	1		
			8)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0		
			9)	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		
			10)	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0		
			11)	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	41		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
			12)	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	0		
			13)	jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	0		
			14)	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	60		
			15)	terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0		
			16)	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	0		
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		1)	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0		
			2)	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0		
			3)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0		
			4)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0		
			5)	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	0		
			6)	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	0		
			7)	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	1		
			8)	Perda/Pergub terkait IUJP	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		6	7
			9) Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	1		
			10) Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0		
			11) Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0		
			12) SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0		
			13) Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	0		
			14) Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	0		
			15) Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0		
			16) Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0		
			17) Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah			
			18)	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	1		
30	PERDAGANGAN		1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	100		
			2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	0		
			3)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	100		
			4)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	3.33		
			5)	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	0		
			1)	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	2		
			2)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	0		
			1)	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	15		
			2)	Indeks Kinerja BPSMB	58.33		
			1)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KENRJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
			2)	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	0		
			3)	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0		
			4)	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0		
			5)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100		
			1)	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	24.01		
			1)	Jumlah barang beredar yang diawasi	18		
			1) a	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi	25		
			1) b	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	25		
			1) c	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	25		
			1) d	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	25		
			2)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5.54		
			3)	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			6	7
				harga Kemendag			
31	PERINDUSTRIAN		1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi perda	70		
			1)	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	0		
			2)	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0		
			3)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0		
			1)	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	73.63		
32	TRANSMIGRASI		1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0		
			2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		
			3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	0		

C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

1. Capaian Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 pada Lembar Kerja Evaluasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$

Atau

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome* yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.4: Kriteria Penilaian

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d. <100	Baik
≥ 65 s.d. <85	Cukup
≥ 50 s.d. <65	Kurang Baik
<50	Tidak Baik

Sumber Data: Biro Organisasi Setda Prov. Sulut

Keberhasilan visi dan misi pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2021-2026 dapat dilihat dari pencapaian target dari tolok ukur kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2023, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.5: Ringkasan Capaian Sasaran Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN IKU	% CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatnya derajat kualitas Sumber Daya Manusia	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,36	75,04	100,91	
		- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,65	94,89	100,31	
		- Prevalensi Stunting (%)	15	20,6	62,6	
		- Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,06	56,97	98,12	
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0-5,7	5,40	100	
		- Gini Ratio (Gini Ratio)	0,355	0,377	106,20	
		- Persentase Angka Kemiskinan (%)	5,93	7,38	75,45	
		- Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,00-6,50	6,10	100	
3	Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas	- Indeks Infrastruktur	0,89	0,834	93,71	
4	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	- Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	0,68	0,82	119,90	77
		- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,11	73,87	103,89	
		- Akses Air Minum Layak	94	94,37	100,40	
		- Akses Sanitasi Layak	87	85,91	98,88	
5	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	- Opini BPK Kualifikasi Penilaian	WTP	WTP	100	
		- Indeks Reformasi Birokrasi	61	56,78	93,08	
		- Indeks SPBE	3.3	2,30	69,70	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis						94,59

Sumber Data: Biro Organisasi Setda Prov. Sulut

Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 yang dilihat dari capaian sasaran strategis menunjukkan bahwa ada satu sasaran strategis yang memiliki persentase capaian >100% dari lima sasaran strategis dan empat sasaran strategis belum tercapai atau tingkat capaiannya berada pada aras <100% yaitu sasaran strategis Meningkatkan derajat kualitas Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, dan Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Selanjutnya jika dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase capaian >100% sebanyak 9 (sembilan) indikator dari total 16 (enam belas) indikator. Sedangkan 7 (tujuh) indikator belum tercapai, atau tingkat capaiannya berada pada aras <100%, yaitu Prevalensi Stunting, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Persentase Angka Kemiskinan, Indeks Infrastruktur, Akses Sanitasi Layak, Indeks Reformasi Birokrasi dan indeks SPBE. Sebagai catatan, beberapa data masih merupakan angka sementara karena belum ada rilis resmi dari BPS ataupun Kementerian teknis terkait. Perhitungan angka sementara dilakukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Teknis terkait Daerah dengan pendekatan *trend* capaian tahun-tahun sebelumnya serta kondisi dari faktor pembentuk indikator tersebut.

a. Sasaran Ke-1

Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia

Tolak ukur untuk mengetahui meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender, Prevalensi Stunting dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) di suatu wilayah.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990, kemudian pada tahun 2010 dilakukan revisi pada metode penghitungannya. Pada X tahun 2014 BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

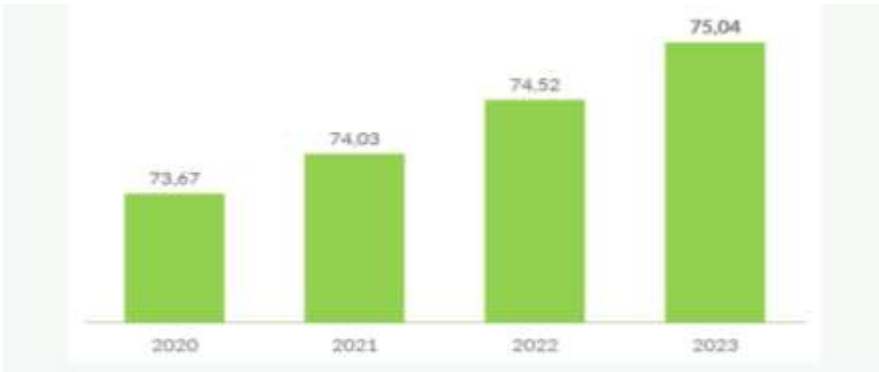
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*), dimensi pengetahuan (*knowledge*), dan dimensi standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk bertahan hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah dan sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang.

Dimensi standar hidup layak digambarkan oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Nilai IPM kemudian dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari masing-masing nilai indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum pada masing-masing komponen indeks.

Secara umum IPM Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami kemajuan. Sejak Tahun 2020, status pembangunan manusia Sulawesi Utara sudah berada di level tinggi. Selama 2020-2023, IPM Sulawesi Utara rata rata

meningkat sebesar 0.62 persen per tahun, dari 73,67 pada tahun 2020 menjadi 75,04 pada tahun 2023 dari tahun ke tahun selama periode 2011 sampai dengan 2023.

Diagram 1: Perkembangan IPM Sulawesi Utara



Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Adapun hasil capaian IPM Sulawesi Utara tahun 2023 dari target 74,36 terealisasi 75,04. Capaian kinerja ini menunjukkan **Sangat Baik** karena berhasil menaikkan nilai IPM sebesar 0,52 atau terealisasi 100,91 persen dari yang ditetapkan sebesar 74,36. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 RPJMD 2021-2026 sebesar 73,81 maka mengalami peningkatan sebesar 1,23.

Tabel 2.6: Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara Tahun 2022 -2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Indeks Pembangunan Manusia	73	74,36	75,04	100,91

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Nilai IPM Provinsi Sulawesi Utara juga selalu berada di atas rata-rata Nasional. Pada Tahun 2023, IPM Provinsi Sulawesi Utara sebesar 75,04 sedangkan nilai IPM Nasional sebesar 74,39. Nilai IPM yang tinggi tersebut menggambarkan bahwa harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah serta pengeluaran per kapita di Provinsi Sulawesi Utara tergolong tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.

Tabel 2.7: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut komponen Tahun 2022-2023

KOMPONEN	2022	2023
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,59	73,85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,95	12,96
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,68	9,77
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	11,179	11,497

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Sebagaimana penjelasan di atas pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-

masing dimensi IPM juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,57 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sulawesi Utara adalah 73,28 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,85 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,26 tahun (0,35 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,21 persen per tahun).

Seiring dengan meningkatnya IPM Sulawesi Utara, dengan sendirinya IPM Kabupaten/Kota mengalami peningkatan. Dari sisi perbandingan antar Kabupaten /Kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing Kabupaten/Kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan nilai 69,17, sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Manado dengan nilai 81,40.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH berkisar antara 70,80 tahun (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) hingga 75,28 tahun (Kota Tomohon). Sementara itu pada dimensi pengetahuan, HLS penduduk usia 7 tahun ke atas berkisar antara 11,63 tahun (Kabupaten Bolaang Mongondow) hingga 14,24 tahun (Kota Tomohon) serta RLS penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar antara 8,17 tahun (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) hingga 11,44 tahun (Kota Manado). Pengeluaran rill per kapita di tingkat Kabupaten/Kota berkisar antara 8,742 (Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro) hingga 14,822 (Kota Manado).

Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang pada tahun 2023 “sangat tinggi” (IPM >80) yaitu Kota Manado, “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) 13 Kabupaten/Kota terdiri dari Minahasa, Kepulauan Sangihe, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Talaud, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Sitaro, Bolaang Mongondow Timur dengan status “sedang” (capaian $60 \leq$

$\text{IPM} < 70$) adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$) tidak ada.

Tabel 2.8: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	
	2022	2023
Kota Manado	80,96	81,96
Kota Tomohon	78,65	79,29
Minahasa	77,72	78,48
Minahasa Utara	75,92	76,50
Kota Bitung	75,94	76,33
Kota Kotamobagu	75,56	76,01
Minahasa Selatan	74,50	75,25
Kep. Sangihe	73,35	73,94
Minahasa Tenggara	72,56	72,97
Kep. Talaud	71,53	72,22
Bolaang Mongondow Utara	70,39	70,97

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	
	2022	2023
Kep. Sitaro	70,18	70,81
Bolaang Mongondow	69,82	70,48
Bolaang Mongondow Timur	69,35	70,09
Bolaang Mongondow Selatan	68,66	69,17
SULAWESI UTARA	74,52	75,04

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Keberhasilan pembangunan manusia Sulawesi Utara meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, *Stakeholder* dan semua pihak terkait dalam upaya penguatan melalui perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia untuk UKM dan UKP rujukan Provinsi, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi, peningkatan kualitas keterampilan dan serapan tenaga kerja pada dinas pendidikan yaitu program ke Jepang, bantuan untuk penyelesaian studi, bantuan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten/Kota, pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten/Kota.

Penguatan atau upaya pembangunan manusia tersebut di atas dilaksanakan melalui program prioritas antara lain sebagai berikut:

- a) Program pengelolaan pendidikan;
- b) Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan.

Meskipun IPM Sulawesi Utara berada di atas rata-rata Nasional dan realisasinya melebihi target RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 namun disatu sisi pencapaian IPM pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara tahun 2023 belum merata. Karena ada jarak/perbedaan cukup signifikan antara Kota Manado yang memiliki nilai IPM tertinggi sebesar 81,40 dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan nilai IPM terendah sebesar 69,17.

Penyebab ketimpangan IPM di Sulawesi Utara dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan pada sektor pembentuk IPM terutama di daerah Kabupaten/Kota yang masih rendah seperti Bolaang Mongondow Selatan.

Pada aspek kesehatan salah satu upaya adalah perbaikan pembangunan manusia melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dalam kerangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan primer serta pemerataan pembangunan pusat layanan kesehatan pada daerah-daerah terbelakang. Di sektor Pendidikan, pemerataan akses pendidikan dilakukan antara lain melalui bantuan bagi siswa miskin khususnya di daerah yang terbelakang, meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk berkebutuhan khusus, peningkatan ketersediaan satuan pendidikan terutama di kecamatan dan desa yang belum memiliki satuan pendidikan. Sementara itu, ketimpangan kinerja ekonomi antar daerah diatasi dengan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan produktivitas masyarakat antar wilayah.

2) Indeks Pembangunan Gender



Gender merupakan paradigma antara perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Di sebagian negara-negara yang didominasi dengan budaya patriarki, perbedaan sering menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, serta kehidupan bermasyarakat.

Untuk menghilangkan diskriminasi gender, diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Tabel 2.9: Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Utara 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Indeks Pembangunan Gender	94,60	94,65	94,89	100,31

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 yang ditargetkan 94,65 terealisasi sebesar 94,89. Capaian kinerja ini menunjukkan **Sangat Baik** karena berhasil meningkatkan IPG sebesar 0,29 atau terealisasi 100,31 persen dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 2021-2026 pada tahun 2021 sebesar 94,53 maka terjadinya peningkatan sebesar 0,36. Realisasi IPG Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar 94,89 juga diatas rata-rata Nasional yang hanya mencapai 91,63 dan ini menggambarkan IPG Provinsi Sulawesi Utara lebih baik dari daerah lain. Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 sebesar 94,89, menunjukkan juga bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu mengendalikan ketimpangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pembangunan guna memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Indikator yang paling banyak memberikan kontribusi sebagai daya ungkit Indeks Pembangunan Gender di Sulawesi Utara di atas rata-rata nasional adalah indikator pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan untuk indikator ekonomi masih perlu intervensi yang serius. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih belum maksimal atau belum memberi dampak dalam mencapai target-target pembangunan sektor ekonomi, artinya sumbangan pendapatan perempuan masih belum sebanding dengan yang dicapai laki-laki. Ketimpangannya cukup signifikan apalagi sumbangan pendapatan perempuan sektor publik. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan perangkat daerah terkait dan BUMD.

Keberhasilan Pembangunan Gender di Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu mengatasi isu permasalahan gender yang sering menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan seperti kondisi tidak adil akibat sistem dan struktur sosial, sub ordinasi salah satu jenis kelamin dianggap penting, pelabelan dan pencitraan pandangan negatif terhadap

salah satu jenis kelamin, marginalisasi atau peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan bagi perempuan, kekerasan secara fisik, psikis rasa sakit, ketakutan tidak percaya diri dan beban ganda perempuan bertanggungjawab disektor publik dan domestik.

Adapun langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui pengarusutamaan gender yang terintegrasi dalam program dan kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, penganggaran sampai pada monitoring dan pelaporan. Sehingga baik laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat peluang dan kesempatan baik dari segi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari intervensi pembangunan melalui program prioritas yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a) Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan;
- b) Program Perlindungan Perempuan (PHP);
- c) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- d) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- e) Perlindungan Khusus Anak.

Terlepas berhasilnya pembangunan gender di Tahun 2023, Sulawesi Utara masih diperhadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain:

- a) Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan mulai dari pemangku kepentingan (stakeholder) sampai pada masyarakat tentang pengarusutamaan gender sehingga isu-isu gender masih tetap dipraktekkan;
- b) Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c) Masih kurangnya peluang/kesempatan bagi perempuan dalam pengambilan keputusan dan sebagai pemimpin baik disektor pemerintah maupun swasta.

Memperhatikan masalah-masalah tersebut, maka perlu diambil upaya dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi dan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam segala sektor;
- b) Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah, dunia usaha media dan akademisi untuk melakukan strategi-strategi pencegahan segala bentuk kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
- c) Memberikan kesempatan dan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil pembangunan baik dari segi akses partisipasi kontrol dan manfaat agar kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud.

3) Prevalensi Stunting



Stunting dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya dibawah standar.

Dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita stunting adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika stunting tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan SDM di masa yang akan datang.

Hasil survei berskala nasional, yakni Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Prevalensi Stunting di Sulawesi Utara mengalami penurunan yang signifikan, yakni dari angka 25,46% di Tahun 2018 menjadi 20,5% di Tahun 2022 atau berkurang sebesar 4,96% dalam 4 (empat) tahun terakhir serta terus berada di bawah rata-rata nasional. Jika dilihat berdasarkan kondisi wilayah pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara menjadi daerah dengan prevalensi stunting yang paling rendah ditahun 2022.

Jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten dan kota se Sulawesi Utara, terdapat 3 kabupaten dengan angka prevalensi yang paling tinggi, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (30%), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (27,9%), dan Kabupaten Minahasa Tenggara (26,5%). Adapun 3 kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi terendah, yaitu Kota Tomohon (13,7%), Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (14,4%), dan Kabupaten Minahasa (16,5%).

Tabel 2.10: Berdasarkan Hasil Pengukuran e-PPGM Bulan Oktober Tahun 2023

NO	KAB/KOTA	SASARAN BALITA PUSDATIN 2023	JUMLAH BALITA DIENTRY	JUMLAH BALITA DIUKUR	%	STUNTING	%
1	Bolaang Mongondow	21,721	15,976	10,033	62.80	61	0.61
2	Minahasa	21,974	17,865	14,437	80.81	143	0.99
3	Kep. Sangihe	8,198	6,526	4,314	66.10	96	2.23
4	Kep. Talaud	7,206	5,252	4,127	78.58	286	6.93
5	Minahasa Selatan	14,818	13,895	12,454	89.63	425	3.41
6	Minahasa Utara	15,634	11,134	9,629	86.48	93	0.97
7	Bolaang Mongondow Utara	7,216	5,329	5,037	94.52	82	1.63
8	Kep. Sitaro	4,155	3,505	3,484	99.40	18	0.52
9	Minahasa Tenggara	8,646	7,582	6,802	89.71	68	1.00
10	Bolaang Mongondow Selatan	7,064	5,472	5,470	99.96	160	2.93
11	Bolaang Mongondow Timur	5,926	5,893	5,520	93.67	215	3.89
12	Manado	30,714	19,668	16,105	81.88	125	0.78
13	Bitung	19,766	15,397	5,243	34.05	268	5.11
14	Tomohon	7,052	4,226	4,226	100	18	0.42
15	Kotamobagu	10,477	6,526	5,504	84.34	141	2.56
Sulawesi Utara		190,567	144,246	112,469	77.97	2199	1.96

data > 80% data 50 % - 79% data < 50%

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Adapun hasil pengukuran dari masing-masing puskesmas ke Provinsi tersebut menunjukkan angka prevalensi stunting di Sulawesi Utara tahun 2023 posisi bulan Oktober sebesar 1,96%, atau berjumlah 2199 balita. Angka tersebut merupakan hasil pengukuran balita dari 77,97% balita yang telah terdata, atau berjumlah 112.469 balita telah diukur dari 144.246 balita yang telah terdata.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah balita stunting dan persentase pengukuran berdasarkan e-PPGBM di Sulawesi Utara Periode Oktober 2023, terdapat 4 (Empat) Kab/Kota yang mengalami kenaikan jumlah Balita Stunting yaitu Kab. Minahasa (+7), Kab. Minahasa Selatan (+34), Kota Manado (+30), Kota Tomohon (+5). Tabel persandingan hasil pengukuran e-PPGBM posisi agustus 2021, posis agustus 2022 dan Oktober 2023 serta persentase pengukuran balita disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.11: Jumlah Balita Stunting dan Persentase pengukuran Berdasarkan e-PPGBM

Kabupaten/Kota	e-ppgbm Agt-21	e-ppgbm Agt-22	e-ppgbm Okt-23	Persentase Pengukuran Balita
Bolaang Mongondow	228	106	61	62.80
Minahasa	174	136	143	80.81
Kepulauan Sangihe	297	278	96	66.10
Kepulauan Talaud	349	496	286	78.58
Minahasa Selatan	286	391	425	89.63
Minahasa Utara	290	313	93	86.48
Bolaang Mongondow Utara	83	115	82	94.52
Siau Tagulandang Biaro	37	22	18	99.40
Minahasa Tenggara	161	122	68	89.71
Bolaang Mongondow Selatan	298	281	160	99.96
Bolaang Mongondow Timur	468	385	215	93.67
Kota Manado	122	95	125	81.88
Kota Bitung	159	289	268	34.05
Kota Tomohon	13	13	18	100.00
Kota Kotamobagu	169	189	141	84.34
Sulawesi Utara	3,134	3,231	2,199	77.97

Adapun jika dilihat berdasarkan jangkauan pengukuran balita pada akhir Periode Oktober 2023, terdapat kab/kota yang masih jauh dari harapan provinsi, yaitu Kota Bitung dengan jangkauan pengukuran di bawah 50%, serta Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Kep. Sangihe, dan Kab. Kep. Talaud yang berada di bawah 80% jangkauan pengukuran.

Tabel 2.12: Persentase Jumlah Balita Tidak Terukur e-PPGBM

Kabupaten/Kota	e-ppgbm Agt-21	e-ppgbm Agt-22	e-ppgbm Okt-23
Bolaang Mongondow	30.49	2.88	37.20
Minahasa	31.56	15.57	19.19
Kepulauan Sangihe	31.47	2.06	33.90
Kepulauan Talaud	41.50	19.22	21.42
Minahasa Selatan	14.90	6.81	10.37
Minahasa Utara	5.79	10.44	13.52
Bolaang Mongondow Utara	4.82	1.10	5.48
Siau Tagulandang Biaro	7.66	1.45	0.60
Minahasa Tenggara	11.03	2.93	10.29
Bolaang Mongondow Selatan	12.44	0.50	0.04
Bolaang Mongondow Timur	11.14	8.03	6.33
Kota Manado	37.45	7.85	18.12
Kota Bitung	32.81	42.02	65.95
Kota Tomohon	4.08	1.60	0.00
Kota Kotamobagu	25.18	5.92	15.66
Sulawesi Utara	22.45	10.57	22.03

Selanjutnya, jika dilihat menurut persentase balita tidak terukur pada periode Oktober 2023, kenaikan persentase jumlah balita tidak terukur terjadi di 11 Kabupaten/Kota. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena dengan tidak terukurnya 22,03% Balita atau 31.777 Jiwa, maka akan terjadi fenomena gunung es dimana kasus yang kelihatan seakan-akan relatif kecil. Hal tersebut perlu komitmen dan keseriusan dari dinas terkait untuk memaksimalkan semua sumber daya yang ada agar supaya kehadiran masyarakat di Posyandu maksimal dan jika perlu melibatkan aparat setempat untuk membantu mengunjungi rumah keluarga/balita yang tidak hadir di kegiatan Posyandu. Sehingga angka prevalensi yang akan muncul cukup menggambarkan kondisi senyatanya di lapangan.

Berdasarkan hasil rilis atau publikasi dari ke dua data tersebut, yakni antara SSGI dan e-PPGBM terdapat perbedaan sifat yang menentukan perbedaan kegunaan data. SSGI digunakan untuk monitoring dan evaluasi kemajuan intervensi gizi di tingkat nasional dan daerah. Sementara, data e-PPGBM berguna untuk memonitor pertumbuhan balita setiap bulannya dan termasuk ke dalam surveilans program gizi. Data e-PPGBM juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penetapan sasaran program gizi di daerah karena bersifat real-time. Penggunaan kedua data ini harus digunakan secara tepat sesuai fungsinya.

Dengan kondisi tersebut dimungkinkan adanya potensi kenaikan Jumlah Balita Stunting pada kab/kota tersebut jika terjadi perluasan jangkauan pengukuran pada posisi e-PPGBM Oktober 2023.

Tabel 2.13: Prevalensi Stunting Sulawesi Utara 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Prevalensi Stunting (%)	16,2	15	20,6	62.6

Walaupun target Prevalensi Stunting tahun 2023 tidak tercapai namun secara keseluruhan prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Utara berhasil turun. Karena Provinsi Sulawesi Utara melakukan upaya penurunan stunting melalui dua intervensi gizi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Sementara intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar kewenangan urusan kesehatan. Dalam penanggulangan permasalahan gizi, intervensi sensitif memiliki kontribusi sebesar 70% sementara intervensi spesifik menyumbang sekitar 30 persennya. Selain dua hal tersebut, diperlukan juga faktor pendukung yang memungkinkan terjadinya penurunan stunting seperti komitmen politik dan kebijakan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor serta kapasitas untuk melaksanakan intervensi yang ada.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan intervensi spesifik penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara, terutama pada dua indikator, yaitu indikator Bumil mengonsumsi Tablet Tambah Darah dan Indikator Bayi Usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak di Provinsi Sulawesi Utara tumbuh dan berkembang dengan sehat dan optimal.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan capaian Prevalensi Stunting tahun 2023 antara lain diakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Beberapa Kabupaten/Kota belum melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan Lokal bersumber protein hewani yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
- b) Sebagian masyarakat belum teredukasi dengan baik terkait pola asuh dan pola makan bagi bayi dan balita serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas Kesehatan.

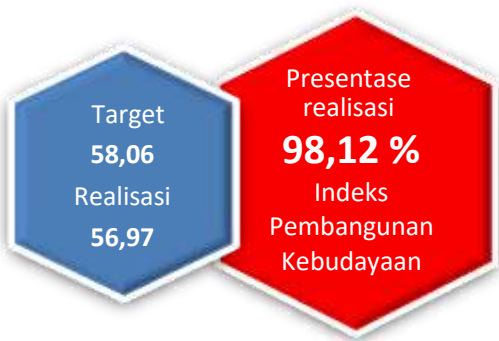
Adapun upaya yang harus dilakukan ke depan antara lain sebagai berikut:

- a) Mendorong Kabupaten/Kota terutama Puskesmas untuk dapat berkoordinasi dengan perangkat desa, TP-PKK dan Kader dalam melaksanakan pemberian makanan tambahan lokal bersumber protein hewani terutama bagi bayi dan balita yang bermasalah gizi.
- b) Melakukan peningkatan pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan ibu balita terkait pola asuh dan pola makan.
- c) Peningkatan koordinasi dan konvergensi antara Bidang Kesehatan dan Lintas Sektor dalam Upaya percepatan penurunan stunting di wilayah Sulawesi Utara.

Pelaksanaan Prevalensi Stunting di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan melalui program antara lain sebagai berikut:

- a) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya pemenuhan kesehatan masyarakat;
- b) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

4) Indeks Pembangunan Kebudayaan



Indonesia merupakan negara adikuasa di bidang kebudayaan. Sebagai bangsa yang bercorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam: suku, ras, adat-istiadat, budaya, bahasa, agama, Indonesia memiliki khazanah kebudayaan yang sangat kaya dan melimpah. Khazanah kebudayaan tersebut tersebar di seluruh penjuru

Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Khazanah kebudayaan bukan saja menunjukkan peradaban suatu bangsa, tapi juga menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang

kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Lebih lanjut IPK merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini IPK tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.

Adapun hasil capaian IPK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sebesar 56,97. Target IPK Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 58,06 terealisasi 98,12 persen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka capaian IPK Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,31 dan menjadi 56,97.

Tabel 2.14: Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Utara 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,28	58,06	56,97	98,12%

Sumber: Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulawesi Utara Tahun 2023

Adapun program yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Utara untuk pembangunan kebudayaan antara lain sebagai berikut:

- a) Program pengembangan kebudayaan;
- b) Program pengembangan kesenian tradisional;
- c) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- d) Program pengelolaan permuseuman.

Menurunnya capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan disebabkan oleh karena dalam pembangunan kebudayaan antara lain belum optimalnya warisan budaya takbenda, benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang ditetapkan dan teregistrasi. Terkait dengan hal tersebut perlu diambil langkah-langkah untuk sosialisasi, pendampingan dan edukasi sehingga warisan budaya takbenda, benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya dapat diusulkan untuk mendapatkan penetapan dan teregistrasi di Kementerian atau lembaga teknis terkait.

b. Sasaran Ke-2

Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat

Untuk mengukur tingkat keberhasilan meningkatnya derajat ekonomi masyarakat, telah ditetapkan 4 (empat) indikator yakni Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Persentase Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

1) Pertumbuhan Ekonomi



Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi disuatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp43,30 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.25,70 triliun. Dan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,65 persen atau terealisasi sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 5,0-5,7 persen dan capaian kinerja ini menunjukkan **Sangat Baik**.

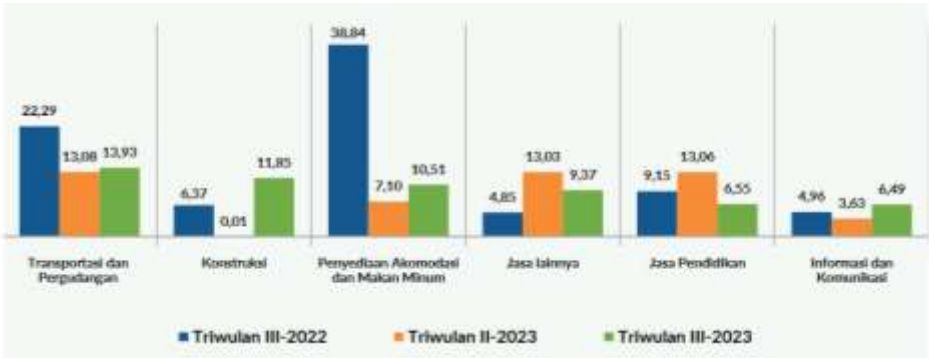
Tabel 2.15: Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5	5,0-5,7	5,65	100

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Ekonomi Sulawesi Utara triwulan III-2023 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y) tumbuh sebesar 5,40 persen. Secara umum, hampir semua lapangan usaha tumbuh positif, kecuali lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi masing-masing sedalam 0,69 dan 3,34 persen. Beberapa lapangan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2023 ini diantaranya Transportasi dan Pergudangan (13,93 persen), Konstruksi (11,85 persen), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,51 persen). Pertumbuhan pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan didorong oleh banyaknya perjalanan dinas baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, adanya penambahan frekuensi penerbangan China Southern Air, serta penambahan jumlah kapal rute Manado-Talaud juga mendorong pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan pada triwulan ini. Lapangan usaha Konstruksi tumbuh signifikan seiring dengan banyaknya proyek pembangunan yang didanai oleh pemerintah dan swasta. Data dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) juga menunjukkan peningkatan pengadaan semen di Sulawesi Utara sejalan dengan besarnya realisasi proyek pembangunan pada triwulan III. Sedangkan pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum didorong oleh banyaknya perjalanan dinas serta pertemuan tatap muka atau Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) yang dilaksanakan di hotel, baik oleh pemerintah maupun swasta. Selain itu, adanya pembukaan restoran baru, dilaksanakannya acara internasional seperti Tomohon International Flower Festival (TIFF) serta acara nasional dan lokal lainnya juga meningkatkan aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum pada triwulan ini.

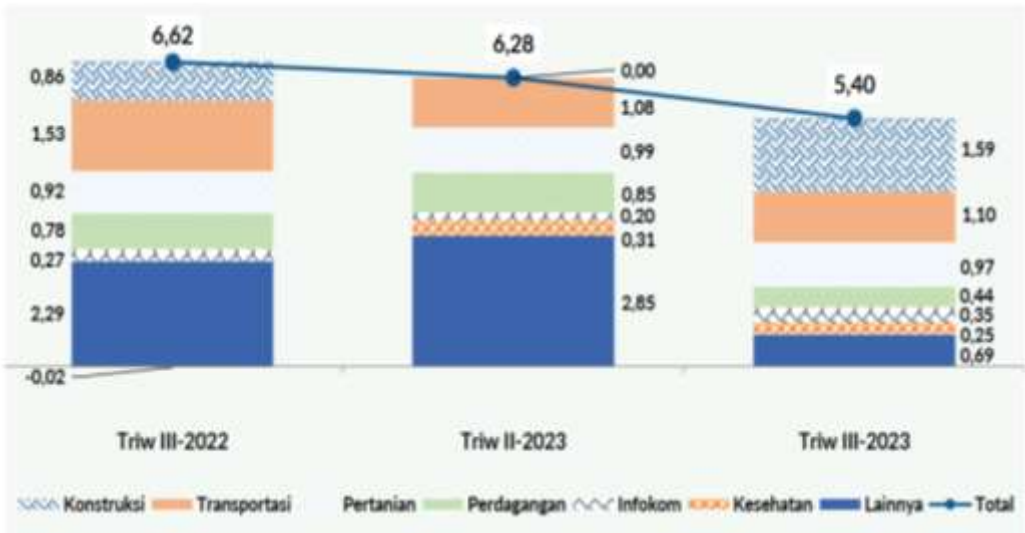
Diagram 2: Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)



Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Struktur perekonomian Sulawesi Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2023 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; dan Industri Pengolahan dengan share masing-masing sebesar 20,55 persen; 13,07 persen; 12,17 persen; 11,75 persen; dan 10,01 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Utara mencapai 67,55 persen. Jika ditinjau dari masing-masing sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara triwulan III-2023 (y-on-y), lapangan usaha Konstruksi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,59 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,10 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,97 persen.

Diagram 3: Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)



Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Ekonomi Sulawesi Utara triwulan III-2023 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 1,63 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, sebanyak 10 kategorimencatatkan pertumbuhan positif, sedangkan 7 kategori lainnya mengalami kontraksi, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2023 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan II-2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,15 persen. Beberapa lapangan usaha yang tumbuh signifikan pada triwulan ini yaitu Konstruksi (19,43 persen); Pertambangan dan Penggalian (12,63 persen); serta Informasi dan Komunikasi (6,06 persen). Pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi didorong oleh banyaknya realisasi proyek pembangunan yang didanai oleh Pemerintah dan Swasta. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi, kegiatan penggalian juga mengalami peningkatan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan konstruksi. Selain itu, peningkatan produksi panas bumi dan pertambangan bijih logam emas juga mendorong pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian pada triwulan ini. Selanjutnya, pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi secara umum disebabkan oleh adanya penambahan kapasitas BTS atau menara telekomunikasi di Sulawesi Utara serta peningkatan jumlah penonton bioskop.

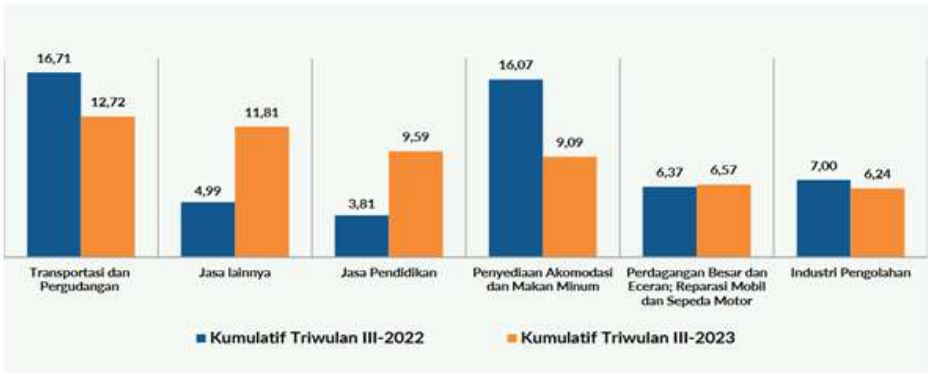
Diagram 4: Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)



Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Secara kumulatif, perekonomian Sulawesi Utara triwulan I s.d. triwulan III-2023 tercatat mengakumulasi pertumbuhan sebesar 5,65 persen. Secara umum, hampir semua lapangan usaha tumbuh positif, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi masing-masing sedalam 2,27 dan 2,37 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 12,72 persen; diikuti lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 11,81 persen; dan lapangan usaha Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 9,59 persen.

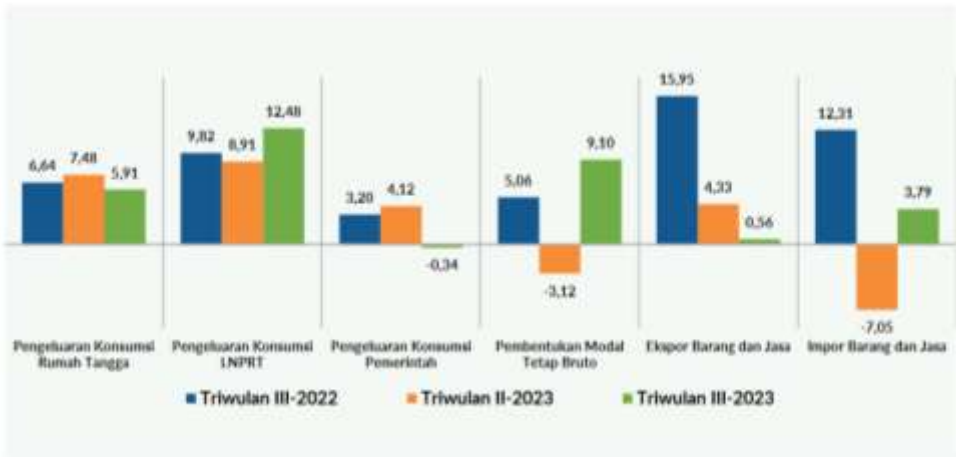
Diagram 5: Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)



Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara triwulan III-2023 terhadap triwulan III-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan pada sebagian besar komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 12,48 persen, salah satu penyebab pertumbuhan pada komponen ini adalah banyak lembaga Non-Profit yang menyelenggarakan aneka perlombaan dan hiburan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, aktivitas politik yang mulai menggeliat menjelang pemilihan umum tahun 2024 juga menjadi pemicu peningkatan pada komponen ini. Pertumbuhan tertinggi kedua terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan pertumbuhan sebesar 9,10 persen, dan diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,91 persen. Di sisi lain, komponen yang mengalami kontraksi adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,34 persen akibat dari penurunan belanja pegawai, dimana pada triwulan sebelumnya terdapat pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

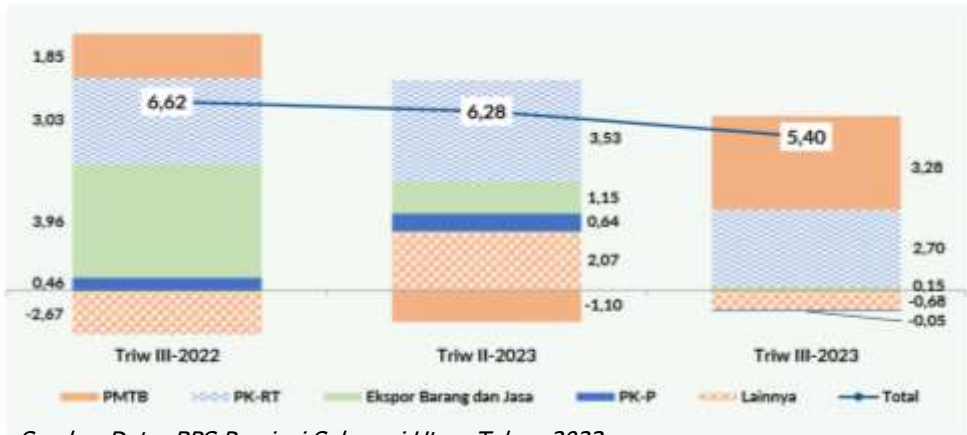
Diagram 6: Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)



Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Struktur PDRB Sulawesi Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2023 masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto, serta Ekspor Barang dan Jasa dengan share masing-masing sebesar 43,39 persen; 37,00 persen; dan 25,48 persen.

Diagram 7: Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)



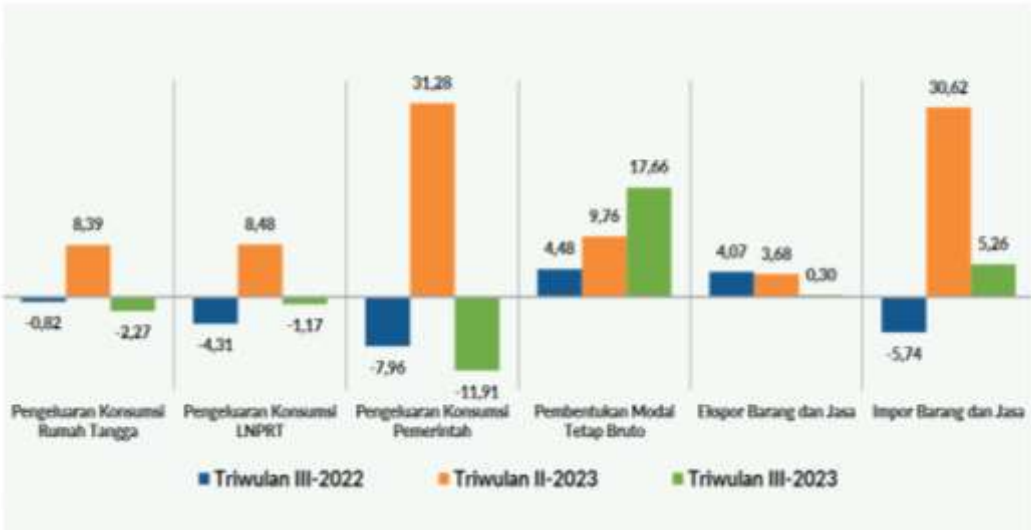
Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara triwulan III-2023, komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 3,28 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan Indeks Konstruksi Provinsi Sulawesi Utara sebesar 12,98 persen yang juga didukung dengan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) yang memperlihatkan adanya peningkatan realisasi pengadaan semen di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, peningkatan PMTB juga dipicu oleh pertambahan tempat usaha seiring dengan pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid-19. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,70 persen. Pertumbuhan pada komponen PK-RT disebabkan adanya peningkatan konsumsi masyarakat pada momen perayaan tahun baru Islam, pengucapan syukur, serta hari kemerdekaan Indonesia.

Ekonomi Sulawesi Utara triwulan III-2023 terhadap triwulan II-2023 (q-to-q) mengalamipertumbuhan sebesar 1,63 persen. Sebagian besar komponen PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan yang positif.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yang tumbuh sebesar 17,66 persen. Pertumbuhan pada komponen ini disebabkan oleh peningkatan investasi (PMA), realisasi pengadaan semen, dan peningkatan belanja modal pada APBD. Selain itu, peningkatan pada komponen ini juga didukung dengan adanya peningkatan impor belanja modal, khususnya HS-73 (Benda-Benda dari Besi dan Baja) dan HS-83 (Berbagai Barang Logam Dasar).

Diagram 8: Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)



Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Secara kumulatif, PDRB Sulawesi Utara triwulan I s.d. triwulan III-2023 dibandingkan triwulan I s.d. triwulan III-2022 (c-to-c) menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,65 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non- Profit yang Melayani Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 9,84 persen, diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 7,34 persen, kemudian komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 1,99 persen.

Tabel 2.16: Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

LAPANGAN USAHA	TRIW III-2023 TERHADAP TRIWII-202 (Q-TO-Q)	TRIW III-2023 TERHADAP TRIW III-2022 (Y-ON-Y)	KUMULATIF TRIWULAN III- 2023 TERHADAP KUMULATIF TRIWULAN III- 2022 (C-TO-C)	SUMBER PERTUMBUHAN TRIW III-2023 (Y-ON-Y)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,19	4,91	5,11	0,97
Pertambangan dan Penggalian	12,63	4,60	-2,27	0,23
Industri Pengolahan	-3,31	1,02	6,24	0,11
Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	0,16	0,02	6,07	0,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,31	1,31	3,16	0,00
Konstruksi	19,43	11,85	4,75	1,59
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan	-2,79	3,39	6,57	0,44

Sepeda Motor				
Transportasi dan Pergudangan	-1,26	13,93	12,72	1,10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,44	10,51	9,09	0,20
Informasi dan Komunikasi	6,06	6,49	5,95	0,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,27	-0,69	-2,37	-0,03
Real Estat	4,27	1,25	3,72	0,04
Jasa Perusahaan	1,31	2,83	4,42	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-21,95	-3,34	5,41	-0,21
Jasa Pendidikan	-1,47	6,55	9,59	0,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,61	5,49	5,62	0,25
Jasa Lainnya	2,58	9,37	11,81	0,15
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,63	5,40	5,65	5,40

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Tabel 2.17: Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Struktur Ekonomi		
	Triw II-2023	Triw II-2023	Triw II-2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,78	20,11	20,55
Pertambangan dan Penggalian	5,18	4,56	5,16
Industri Pengolahan	10,51	10,61	10,01
Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	0,11	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah danDaur Ulang	0,11	0,10	0,10
Konstruksi	11,60	10,35	12,17
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan SepedaMotor	13,24	13,51	13,07
Transportasi dan Pergudangan	10,44	11,94	11,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,61	1,63	1,66
Informasi dan Komunikasi	4,06	3,92	4,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,78	3,55	3,46
Real Estat	3,06	2,84	2,92
Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	6,87	8,10	6,16
Jasa Pendidikan	2,97	3,11	3,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,99	3,87	4,02
Jasa Lainnya	1,60	1,62	1,64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

- Pembangunan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2023 dilaksanakan melalui program prioritas antara lain sebagai berikut:
- a) Program pengembangan iklim penanaman modal;
 - b) Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - d) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - e) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - f) Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
 - g) Program pengembangan ekspor.

2) Gini Ratio



Perekonomian Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan dari tahun-ke tahun. Walaupun peningkatan kinerja tersebut dibarengi dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita namun masih terjadi ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Gini Ratio

sebagai alat pengukur tingkat ketimpangan pengeluaran suatu wilayah secara menyeluruh nilainya berkisar antara 0-1 dimana semakin kecil nilai Gini Ratio maka semakin kurang tingkat ketimpangan.

Berdasarkan berita resmi statistik tanggal 17 Juli 2023 bahwa nilai Gini Ratio Sulawesi Utara Tahun 2023 sebesar 0,377 Sejak Maret 2016 angka Gini Ratio Sulawesi Utara mengalami trend yang cenderung menurun. Pada Maret - September 2018 terjadi peningkatan harga-harga bahan makanan yang menyebabkan angka Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Walau sempat tinggi, pada Maret 2020 hingga September 2021 angka Gini Ratio mengalami penurunan namun kembali mengalami peningkatan hingga Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan Gini Ratio sebesar 0,022 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,355 dan peningkatan sebesar 0,015 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,362. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,345, turun sebesar 0,007 poin dibandingkan dengan kondisi September 2022 dan juga penurunan sebesar 0,009 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 dan Maret 2022 masing-masing tercatat sebesar 0,352 dan 0,354.

Tabel 2.18: Gini Ratio Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Gini Ratio	0,360	0,355	0,377	106,20

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

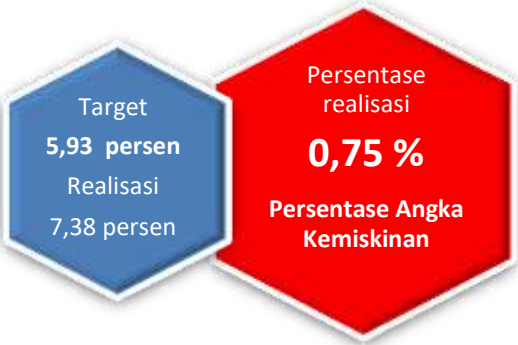
Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 4BRS No. 51/07/71 Th. XVII, 17 Juli 2023 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Sulawesi Utara, Maret 2023 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,28 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 18,57 persen dan meningkat dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 18,11 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada Maret 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di

daerah perkotaan adalah sebesar 18,04 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,30 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan perdesaan termasuk ketimpangan rendah. Pada Maret 2023, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,449. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,245 (Tabel 2). Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,388, terdapat empat provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), Gorontalo (0,417).

Keberhasilan atas capaian Gini Ratio tahun 2023, dilaksanakan melalui beberapa upaya yang dilakukan melalui program prioritas antara lain:

- a) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- b) Program pembinaan keluarga berencana;
- c) Program pengendalian penduduk.

3) Persentase Angka Kemiskinan



Seiring dengan masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat Sulawesi Utara, kondisi tersebut menjadi salah satu pendorong masih terjadinya kemiskinan di Sulawesi Utara. Tingkat kemiskinan merupakan pengukuran dengan persentase angka kemiskinan yang menggambarkan proporsi masyarakat

yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Persentase Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 5,93 persen terealisasi 7,38 persen.

Persentase Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Persentase Angka Kemiskinan Nasional yang sebesar 9,71 persen. Dan ini menunjukkan bahwa Persentase Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara lebih rendah dari daerah lain seperti Provinsi Gorontalo yang sebesar 15,15 persen, Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 12,41 persen.

Yabel 2.19: Persentase Angka Kemiskinan Sulawesi Utara Tahun 2022-2023 (Maret)

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Persentase Angka Kemiskinan (%)	7,5-6,9	5,93	7,38	75,45%

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara pada Maret 2023 mencapai 189 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 1,7 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 3,86 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 7,38 persen, meningkat 0,04 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat 0,10

persen poin terhadap Maret 2022. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 1,9 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 3,5 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 5,04 persen menjadi 4,91 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 10,16 persen menjadi 10,38 persen.

Tabel 2.20: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tahun 2022-2023

DAERAH	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA ORANG)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
PERKOTAAN	Maret 2022	70,42	5,14
	September 2022	70,90	5,04
	Maret 2023	69,03	4,91
PERDESAAN	Maret 2022	114,72	9,77
	September 2022	116,43	10,16
	Maret 2023	119,97	10,38
TOTAL	September 2021	185,14	7,28
	September 2022	187,33	7,34
	Maret 2023	189,00	7,38

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan secara sistematis, terencana, dan sinergis pada tingkatan pemerintah, mulai dari pusat hingga pemerintah daerah serta lintas sektor. Disamping itu juga, dilakukan penguatan dan penyelarasan tugas-tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan melibatkan semua pemangku kepentingan masyarakat agar program yang dilaksanakan fokus dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara melalui Gerakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang bertujuan antara lain sebagai berikut:

- a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro kecil; dan
- d) Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Program prioritas Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara antara lain sebagai berikut:

- a) Program Pemberdayaan Sosial;
- b) Program Rehabilitasi Sosial; dan
- c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Adanya kenaikan angka kemiskinan Sulawesi Utara ditahun 2023 disebabkan permasalahan yang diakibatkan karena masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat dan belum efektifnya intervensi program kegiatan pengurangan kemiskinan yang disebabkan antara lain *inclusion* dan *exclusion error* data masyarakat miskin. Untuk itu, upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah menjaga daya beli masyarakat, mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas program kegiatan pengurangan kemiskinan.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Adapun hasil capaian tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Utara tahun 2023 yang ditargetkan 6,00-6,50 persen terealisasi sebesar 6,10 persen atau 100 persen dan hasil kinerja ini menunjukkan **Sangat Baik**. Walaupun capaian ini masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 5,32 persen, namun ada penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,51 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 6,61.

Tabel 2.21: Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,47 - 7,18	6,00-6,50	6,10	100

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Utara. Penduduk usia kerja pada Februari 2023 sebanyak 2,07 juta orang, naik sebanyak 21,76 ribu orang dibanding Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1,31 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 759,66 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri dari 1,23 juta orang penduduk yang bekerja dan 81,12 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2022, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 41,31 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 42,78 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 1,45 ribu orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja diiringi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. Pada Februari 2023, TPAK tercatat sebesar 63,31 persen, naik 1,34 persen poin dibandingkan Februari 2022.

Tabel 2.22: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	PERUBAHAN TAHUN 2022		PERUBAHAN TAHUN 2023	
	Orang	Orang	Orang	persen	orang	persen
Penduduk Usia Kerja	1.968.971	2.978.473	18.213	0,93	109.502	5,56
Angkatan Kerja	1.242.088	1.332.149	29.751	2,45	90.061	7,25
- Bekerja	1.159.965	1.250.948	33.168	2,94	90.983	7,85
- Pengangguran	82.123	81.201	-3.417	-3,99	-922	-1,12
Bukan Angkatan Kerja	726.883	746.324	-11.538	-1,56	19.441	2,67

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Indonesia. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2023, struktur penduduk bekerja masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu Pertanian sebesar 22,03 persen, Perdagangan sebesar 18,60 persen dan Industri Pengolahan sebesar 10,89 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini masih sama dengan periode Februari 2022 Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi terbesar jika dibandingkan dengan Februari 2022 adalah Pengangkutan, Pergudangan dan Infokom (24,25 ribu orang); Jasa Kesehatan (16,71 ribu orang); dan Jasa Lainnya (11,81 ribu orang). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Pertanian (20,44 ribu orang); Industri Pengolahan (11,49 ribu orang); dan Jasa Pendidikan (7,45 ribu orang).

Tabel 2.23: Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2022-2023

STATUS PEKERJA	TAHUN 2022 (PERSEN)	TAHUN 2023 (PERSEN)
Buruh/Karyawan/Pegawai	37,89	39,14
Berusaha Sendiri	31,07	31,69
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	8,20	8,43
Pekerja Keluarga	8,06	7,65
Pekerja Bebas Di Non Pertanian	6,77	6,02
Pekerja Bebas di Pertanian	5,05	4,35
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	2,96	2,72

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai pada Februari 2023 masih mendominasi komposisi tenaga kerja di Sulawesi Utara yaitu sebesar 38,52 persen, diikuti oleh berusaha sendiri (31,37 persen), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap (9,27 persen). Dibandingkan Februari 2022, penurunan terjadi pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap, status pekerja bebas pertanian, status pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar masing-masing sebesar 2,16 persen poin, 0,71 persen poin, 1,43 persen poin, dan 0,59 persen poin. Apabila dibandingkan Februari 2021, status pekerjaan yang mengalami penurunan tertinggi yaitu berusaha dibantu buruh tidak tetap (2,46 persen poin). Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka

yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Februari 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 727,28 ribu orang (59,14 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 502,58 ribu orang (40,86 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Februari 2023 turun sebesar 3,74 persen poin jika dibandingkan Februari 2022, dan turun sebesar 3,68 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2021.

Tabel 2.24: Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Menurut Kegiatan Formal dan Informal Tahun 2022-2023

KEGIATAN FORMAL/INFORMAL	TAHUN 2022 (PERSEN)	TAHUN 2023 (PERSEN)
Kegiatan Formal	40,85	41,86
Kegiatan Informal	59,15	58,14

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan merupakan salah satu indikasi kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Saat ini, sebanyak 31,07 persen penduduk bekerja di Sulawesi Utara berpendidikan SD ke bawah pada Februari 2023. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan Perguruan Tinggi sebesar 13,48 persen. Kontribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Februari 2022 maupun Februari 2021. Dibandingkan dengan Februari 2022, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (0,22 persen poin) dan Perguruan Tinggi (1,82 persen poin). Peningkatan tertinggi persentase penduduk bekerja berada pada jenjang pendidikan SMA, yaitu naik sebesar 1,36 persen poin. Sementara apabila dibandingkan Februari 2021, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami kenaikan hanya pada jenjang pendidikan SMA, yaitu sebesar 3,20 persen poin. Penurunan terbesar persentase penduduk bekerja berada pada jenjang pendidikan SMP, yaitu turun sebesar 1,52 persen poin.

Tabel 2.25: Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2022-2023

STATUS PEKERJA	TAHUN 2022 (PERSEN)	TAHUN 2023 (PERSEN)
SD Ke Bawah	29,57	28,53
Sekolah Menengah Atas	26,73	26,43
Sekolah Menengah Pertama	17,68	17,72
Perguruan Tinggi	14,68	14,88
Sekolah Menengah Kejuruan	11,33	12,43

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengurangi tingkat pengangguran terbuka hal ini disebabkan karena adanya beberapa pembangunan strategis yang dilaksanakan di Sulawesi Utara sehingga adanya penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan antara lain pada pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang, Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Pembangunan Ring Road III, Pembangunan Malalayang Beach Walk, serta pada program Marijo Bakobong yang merupakan salah satu upaya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sebagai ajakan kepada masyarakat untuk berkebun.

Adapun program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengurangi persentase tingkat pengangguran terbuka antara lain sebagai berikut:

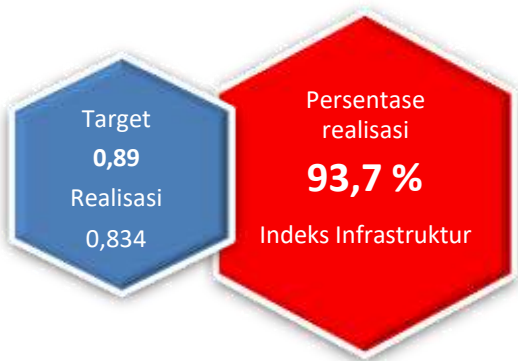
- a) Program perencanaan tenaga kerja;
- b) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- c) Program pengembangan (UMKM);
- d) Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan kegiatan pengurangan pengangguran pada tahun 2023, yaitu Pelatihan Berbasis Kompetensi, Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, Pemagangan Dalam Negeri Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Pemagangan Luar Negeri ke Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Peningkatan Pelayanan Antar Kerja dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Terlepas dari berhasilnya kinerja dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka tetapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut tentunya sangat tergantung pada dukungan anggaran pemerintah dan penyerapan/penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan/lowongan pekerjaan yang tersedia pada perusahaan/ dunia industri. Sehingga upaya yang diperlukan adalah koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan/ lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya.

c. Sasaran Ke-3
Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas

Untuk mengukur tingkat keberhasilan meningkatnya infrastruktur dan konektivitas, telah ditetapkan indikator yakni indeks infrastruktur.

➤ Indeks Infrastruktur



Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa. Disamping itu juga Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu pendorong pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut Indeks Infrastruktur digunakan sebagai salah satu indikator untuk

mengukur tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur.

Adapun hasil capaian Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 0,89 terealisasi sebesar 0,834 atau 93,71 persen dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,91 terjadi penurunan sebesar 0,0. Dengan capaian indeks infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sebesar 0,89.

Tabel 2.26: Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Indeks Infrastruktur	0,88	0,89	0,834	93,71

Sumber Data: DIInas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Pengukuran Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara diperoleh dari rata-rata penjumlahan ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis, yaitu kemantapan jalan, kemantapan irigasi, akses air minum layak, akses sanitasi layak, pengurangan kawasan kumuh dan rasio elektrifikasi.

Tabel 2.27: Aspek Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

NO	ASPEK INFRASTRUKTUR	CAPAIAN (%)	X 100 (INDEKS)
1.	Kemantapan jalan	83,45	0,83
2.	Kemantapan irigasi	86,66	0,87
3.	Air minum layak	94,37	0,94
4.	Sanitasi layak	85,91	0,86
5.	Perumahan layak	72,39	0,72
6.	Pengurangan kawasan kumuh	95,33	0,95
7.	Rasio Elektrifikasi	99,99	0,99
INDEKS INFRASTRUKTUR		88,3	0,88

Sumber Data: DINas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap tahun 2023 mencapai 83,45 persen atau sepanjang 832,275 Km dari panjang jalan total 997,317 Km, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Rutahun 2023. Kondisi kemantapan jalan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sebesar 83,45 persen capaiannya mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Rasio elektrifikasi merupakan juga salah satu pembentuk indeks infrastruktur. Adapun capaian rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 tetap stabil sebesar 99,99 persen melebihi target Nasional 99,74 % hingga kuartal II1 2023. Saat ini dari 17 desa yang belum berlistrik pada tahun 2022, telah mengalami peningkatan dengan terlistriknya 5 desa di2 Kabupaten perbatasan NKRI yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, sehingga total desa yang belum perlistrik berkurang menjadi 12 Desa dirampungkan pada Tahun Anggaran 2024 oleh stake holder terkait (PT. PLN), dimana sebagian besar pekerjaan infrastruktur pembangkit listrik ini telah berprogres pada angka 30 %.

Adapun program strategis yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks Infrastruktur antara lain sebagai berikut:

- a) Program pengembangan permukiman;
 - b) Program penataan bangunan gedung;
 - c) Program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - d) Program penyelenggaraan jalan;
 - e) Program pengembangan perumahan;
 - f) Program kawasan permukiman;
 - g) Program peningkatan prasarana, sarana dan instalasi umum (PSU);
 - h) Program pengelolaan ketenagalistrikan.
- Beberapa permasalahan yang diperhadapkan dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara antara lain sebagai berikut:
- a) Kondisi jalan Provinsi dalam kondisi mantap masih perlu ditingkatkan.

- b) Masih adanya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni dan kurangnya akses masyarakat terhadap lahan perumahan murah dan terjangkau;
- c) Akses terhadap air bersih dan sanitasi masih sangat rendah dan belum mencapai standar pelayanan minimum perumahan rakyat.

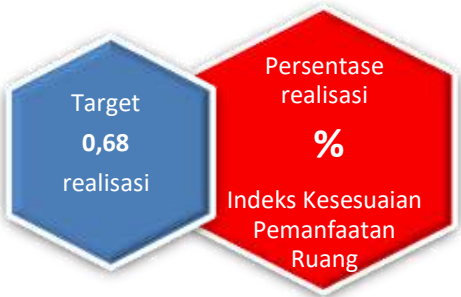
Upaya yang harus dilakukan terkait dengan permasalahan pembangunan infrastruktur tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas infrastruktur seperti, jalan, irigasi dan keciptakaryaan;
- b) Memberikan bantuan rumah tinggal layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan prasarana dan sarana umum (PSU);
- c) Meningkatkan kapasitas penyaluran air minum curah lintas kabupaten/Kota.

d. Sasaran Ke-4
Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, telah ditetapkan 4 (empat) indikator yakni Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak.

1) Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan

evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan Kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun Kabupaten/Kota terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi.

Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (IKPR) adalah tingkat perbandingan antara luas pencapaian pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan total luasan peruntukan pola ruang dalam RTRW. RTRW yang dimaksud adalah RTRW Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014. Perhitungan Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang diukur dari 17 (tujuh belas) kawasan peruntukan sesuai pola ruang yang terbagi dalam dua Bagian meliputi:

- a) Bagian kawasan lindung terdiri dari:
 - Tubuh air;
 - Kawasan hutan lindung;

- Kawasan lindung geologi;
- Kawasan sekitar danau;
- Kawasan sempadan pantai; dan
- Kawasan suaka alam.

b) Kawasan budidaya terdiri dari:

- Kawasan hutan produksi;
- Kawasan hutan produksi terbatas;
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- Kawasan industri;
- Kawasan instansi lainnya;
- Kawasan pariwisata;
- Kawasan perkebunan dan tanaman tahunan;
- Kawasan permukiman;
- Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan basah); dan
- Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan kering).

Perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung berdasarkan luas capaian pembangunan yang sesuai dengan pola ruang sedangkan rencana pola ruang adalah luasan seluruh kawasan yang masuk dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam RTRW Provinsi Sulawesi Utara dengan peta dasar yang digunakan sesuai dengan Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dasar untuk Penyusunan RTRW Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 1.8/KA-BIG/IGT.02.04/12/2023. Berdasarkan pengukuran tersebut maka indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 0,68 terealisasi 0,82. Capaian kinerja ini menunjukkan angka yang Sangat Baik karena terealisasi 119,90 Persen dari target yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,60 sebagai kondisi awal RPJMD 2021-2026 maka terjadi peningkatan sebesar 0,135 terhadap realisasi tahun 2023. Capaian realisasi Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 dalam kriteria perhitungan nasional masuk kriteria sangat baik. Adapun program prioritas yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang melalui program penyelenggaraan penataan ruang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,60 sebagai kondisi awal RPJMD 2021-2026 maka terjadi peningkatan sebesar 0,135 terhadap realisasi tahun 2023. Capaian realisasi Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 dalam kriteria perhitungan nasional masuk kriteria sangat baik. Adapun program prioritas yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang melalui program penyelenggaraan penataan ruang melalui program penyelenggaraan penataan ruang.

Tabel 2.28: Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	0,60	0,68	0,82	119,90

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tantangan/ permasalahan dalam mempertahankan maupun meningkatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikarenakan seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat diantaranya aktivitas kegiatan perdagangan barang dan jasa, pertambangan, industri, pembangunan perumahan serta aktivitas sosial ekonomi lainnya yang perkembangannya semakin pesat. Upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kesesuaian pemanfaatan ruang antara lain melalui:

- a) Pendampingan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh Kabupaten/Kota;
- b) Tindakan non yustisi;
- c) Melakukan sosialisasi indikasi program RTRW kepada OPD, Kabupaten/Kota, masyarakat, *stakeholder* terkait untuk menjadikan indikasi program RTRW tersebut sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan untuk mendukung kesesuaian pemanfaatan ruang;
- d) Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e) Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- f) Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. Untuk menggambarkan IKLH pada suatu wilayah pada waktu tertentu, merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas

Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.

Nilai IKLH diperoleh dari perhitungan 4 (empat) indikator IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (Air Sungai dan Danau) Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Adapun hasil capaian IKLH Sulawesi Utara tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 71,11 terealisasi sebesar 73,87 atau 104 persen dari target yang ditetapkan dan hasil kinerja ini menunjukkan **Baik**.

Tabel 2.29: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,81	71,11	73,87	103,89

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Capaian IKLH tahun 2023 sebesar 73,87 diatas dari rata-rata nasional yang sebesar 72,54 persen.

IKLH diperoleh dari $= (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL) = (0,340 \times 52.12) + (0,428 \times 93.52) + (0,133 \times 62.33) + (0,099 \times 79.18) = \mathbf{73.87}$.

Nilai IKLH tahun 2023 tersebut diperoleh dari agregasi perhitungan 4 (empat) indeks, sebagai berikut:

- a) Indeks Kualitas Air (IKA), diperoleh berdasarkan hasil pengukuran 7 (tujuh) parameter kualitas air meliputi parameter pH, DO, COD, BOD, TSS, *Phospate*, *Fecal Coliform* dan Nitrat pada 31 Sungai dan 4 Danau di Provinsi Sulawesi Utara. Periode pemantauan dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun yang mempresentasikan musim hujan, peralihan dan kemarau. Titik pemantauan selama dua periode tersebut sebanyak 189 titik pantau dan data sampel yang masuk dan terverifikasi sebanyak 52 data. Adapun realisasi nilai IKA Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebesar 52.12.
- b) Indeks Kualitas Udara (IKU), perhitungannya menggunakan metode *passive sampler* di 4 (empat) titik yang mewakili kawasan perkantoran, kawasan permukiman, kawasan industri dan transportasi. Perhitungan kualitas udara dengan bobot 0,428 diukur berdasarkan parameter-parameter NO_2 (Nitrogen Dioksida) dan SO_2 (Sulfur Dioksida). Juga dilakukan pemantauan kualitas Udara Ambien dilakukan melalui alat *Air Quality System (AQMS)* untuk menghitung Indeks Pendamar Udara (ISPU) pada dua titik dengan parameter yang diukur PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$, CO, SO_2 , NO_2 , O_3 dan HC. Adapun realisasi nilai IKU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar 93.52.
- c) Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKTL adalah nilai yang menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan, dikarenakan karena Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki ekosistem gambut, maka perhitungan IKL merupakan IKTL. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen dalam upaya perbaikan lingkungan hidup melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi maupun restorasi lingkungan untuk meningkatkan luas tutupan lahan baik di kawasan hutan maupun pesisir pantai. Disamping itu pula, indeks kualitas tutupan lahan merupakan bagian dari nilai indeks kualitas lingkungan hidup telah menjadi target RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026, Berdasarkan Tabel 14 hasil perhitungan hasil perhitungan 15 kabupaten/kota pada Aplikasi IKLH diperoleh 62.33 melampaui target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2025 sebesar 61.05 dan IKL Nasional sebesar 61.79.
- d) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), perhitungannya menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (*National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI*), dengan menggunakan hasil analisis lima parameter kunci (padatan tersuspensi total (TSS), Oksigen Terlarut (DO), minyak dan

lemak, Amonia Total (N-NH_3) dan Orto-Fosfat ($\text{PO}_4\text{-P}$) dan kategori indeks kualitas air laut. Hasil perhitungan IKAL Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun 2023 yang sudah diolah melalui aplikasi Web IKLH adalah 79,19 (Baik) turun 4% dari Tahun 2022 yaitu 82,65 tetapi hasilnya melampaui target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 yaitu 77,7 dan IKAL Nasional 78,4.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas capaian kinerja pembangunan IKLH tahun 2023 dilaksanakan melalui program prioritas antara lain sebagai berikut:

- a) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- c) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- d) Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- e) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- f) Program pengelolaan persampahan;
- g) Program pengelolaan hutan;
- h) Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- i) Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Terlepas dari keberhasilan kinerja IKLH Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 namun terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

- a) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan;
- b) Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala caraserta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar;
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- d) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor.

Adapun langkah-langkah/upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- a) Memperkuat instrument peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya penataan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten;
- b) Peningkatan kualitas penilai AMDAL Kab/Kota;
- c) Upaya penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup;
- d) Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan;
- e) Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- f) Upaya melakukan perlindungan Keanekaragaman Hayati dari ancaman kepunahan;
 - g) Pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau dan pengawasan PROPER perusahaan
 - h) Meningkatkan Penanganan Sampah (Pengelolaan dan Pengurangan Sampah);
 - i) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - j) Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.
- 3) Akses Air Minum Layak



Air adalah suatu sumber daya alam yang terbatas dan merupakan suatu barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. hak asasi manusia atas air merupakan hal yang tidak bisa ditinggal dalam menjalani suatu kehidupan yang bermartabat. Hak ini merupakan kebutuhan awal bagi pemenuhan hak

asasi manusia lainnya. Dan akses air minum layak merupakan salah satu kriteria dalam pemenuhan ketersediaan air bagi masyarakat atau rumah tangga.

Berdasarkan hasil rilis dari BPS Provinsi Sulawesi Utara bahwa akses air minum layak Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar 94,37 persen. Hasil ini meningkat 0,37 persen dari target RPJMD 2021-2026 pada tahun 2023 yang sebesar 94 persen dan/atau terealisasi sebesar 100,40 persen serta menunjukkan kinerja **Sangat Baik**. Capaian akses air minum layak Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar 94,37 persen juga di atas rata-rata nasional sebesar 91,72 persen dan ini menggambarkan bahwa akses air minum layak Provinsi Sulawesi Utara masih lebih baik dari daerah lain.

Tabel 2.30: Akses Air Minum Layak Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Akses Air Minum Layak (%)	92	94	94,37	100,40

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan atas akses air minum layak pada tahun 2023, akses air minum layak perkotaan mencapai sebesar 95,46 persen dan lebih besar persentasenya dibandingkan dengan wilayah perdesaan yang hanya sebesar 92,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase rumah tangga menikmati air minum layak di wilayah perkotaan lebih baik dari perdesaan.

4) Akses Sanitasi Layak



Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.

Berdasarkan hasil rilis dari BPS Provinsi Sulawesi Utara bahwa akses sanitasi layak Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 sebesar 84,05 persen. Hasil capaian akses sanitasi layak tahun 2022 sebagaimana dalam RPJMD 2021-2026 yang sebesar 85 persen tidak tercapai dan hanya terealisasi sebesar 98,88 persen atau hanya menunjukkan kinerja **Baik**. Jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 2021-2026 pada tahun 2021 yang sebesar 84,85 maka terjadi penurunan capaian sebesar 0,80 persen di tahun 2022. Walaupun capaian akses sanitasi layak tidak tercapai namun masih di atas rata-rata nasional sebesar 80,92 persen dan ini menggambarkan bahwa akses sanitasi layak Provinsi Sulawesi Utara masih lebih baik dari daerah lainnya.

Tabel 2.31: Akses Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Akses Sanitasi Layak (%)	85	87	85,91	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan atas persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 yakni di daerah perkotaan sebesar 85,78 persen sedangkan di perdesaan sebesar 81,91 persen dan ini menunjukkan bahwa akses sanitasi layak di perkotaan lebih baik dari perdesaan. Persentase rumah tangga di daerah perkotaan di Provinsi Sulawesi Utara dengan kepemilikan serta penggunaan fasilitas tempat buang air besar tahun 2022 yakni digunakan hanya ART sendiri sebesar 85,01 persen, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu sebesar 10,51 persen, di MCK komunal sebesar 0,26 persen, di MCK umum/siapaapun menggunakan sebesar 0,57 persen, ART tidak menggunakan sebesar 0,01 persen dan tidak ada fasilitas sebesar 3,63 persen. Sedangkan di daerah perdesaan kepemilikan serta penggunaan fasilitas tempat buang air besar tahun 2022 yakni digunakan hanya ART sendiri sebesar 80,61 persen, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu sebesar 4,83 persen, di MCK komunal sebesar 0,15 persen, di MCK umum/siapaapun menggunakan sebesar 2,25 persen, ART tidak menggunakan sebesar 0,22 persen dan tidak ada fasilitas sebesar 11,95 persen.

Selanjutnya persentase rumah tangga di daerah perkotaan dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri /bersama/MCK komunal menurut tempat pembuangan air tinja yaitu tangki septik sebesar 94,14 persen, IPAL sebesar 0,36 persen, kolam/sawah/sungai/danau/laut sebesar 1,26 persen, lubang tanah sebesar 3,91 persen, pantai/tanah lapang/kebun sebesar 0,14

persen, lainnya sebesar 0,19 persen. Sedangkan persentase rumah tangga di daerah perdesaan dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama/MCK komunal menurut tempat pembuangan air tinja yaitu tangki septik sebesar 85,91 persen, IPAL sebesar 0,74 persen, kolam/sawah/sungai/danau/laut sebesar 1,13 persen, lubang tanah sebesar 11,83 persen, pantai/tanah lapang/kebun sebesar 0,11 persen, lainnya sebesar 0,28 persen.

Persentase rumah tangga di daerah perkotaan dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama/MCK komunal dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik menurut lama tangki septik dibuat/dibangun yaitu kurang dari 5 tahun sebesar 12,76 persen, di atas 5 tahun sebesar 45,55 persen, tidak tahu sebesar 41,68 persen. Sedangkan persentase rumah tangga di daerah perdesaan dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama/MCK komunal dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik menurut lama tangki septik dibuat/dibangun yaitu kurang dari 5 tahun sebesar 23,60 persen, di atas 5 tahun sebesar 49,24 persen, tidak tahun sebesar 27,16 persen.

Persentase rumah tangga di daerah perkotaan dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama/MCK komunal dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang pernah dikosongkan/dilakukan penyedotan dalam lima tahun terakhir pada tahun 2022 di daerah perkotaan sebesar 12,92 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 3,71 persen.

Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian pembangunan akses sanitasi layak dilaksanakan melalui program prioritas yaitu program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Adapun permasalahan pembangunan akses sanitasi layak tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Utara dimana adanya ketimpangan di perdesaan terhadap akses sanitasi layak bila dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Solusi yang harus ditempuh antara lain melalui edukasi kepada masyarakat dan program pembangunan akses sanitasi layak ke depan agar kiranya difokuskan di perdesaan.

e. Sasaran Ke-5

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator yakni Opini BPK, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks SPBE.

1) Opini BPK



Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pertanggung jawaban konstitusional pemerintah kepada negara dan pertanggung jawaban moral kepada rakyat dengan memaksimalkan Pengelolaan Keuangan di Daerah.

Hasil evaluasi atas laporan keuangan yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023

bakal memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini terealisasi 100 persen dan menunjukkan Kinerja **Sangat Baik** karena sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun 2023. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dan tahun pertama RPJMD 2021-2026 maka capaiannya sama yakni WTP dan capaian ini merupakan capaian WTP yang ke 10 tahun berturut-turut.

Tabel 2.32: Opini BPK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencapai keberhasilan kinerja ini dengan melakukan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern dan pelaksanaan APBD sesuai ketentuan serta dalam penyajian laporan keuangan secara wajar berupa material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip Sistem Akuntansi Pemerintahan. Disamping hal tersebut di atas, dilakukan juga upaya pencegahan korupsi melai kegiatan penyuluhan anti korupsi, kegiatan unit pengendalian gratifikasi dan kegiatan saber pungli serta melakukan sosialisasi/Internaisasi peningkatan kesadaran dan perilaku melaporkan LHKPN. Selanjutnya di bidang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan antara lain Penetapan APBD tepat waktu, mendorong penyerapan anggaran dan penyusunan perencanaan umum pengadaan barang sebagai proses dasar pengadaan barang/jasa dan penguatan pengelolaan barang daerah.

Adapun program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja melalui Program pengelolaan keuangan daerah. Terlepas dari keberhasilan capaian pemerintah provinsi Sulawesi Utara mendapatkan WTP namun masih ditemukan permasalahan yakni adanya Aset Barang Milik Daerah berupa tanah diduduki oleh masyarakat, adapun solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut yakni melakukan penegakan hukum, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kepemilikan aset milik pemerintah dan meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk pengawasan aset.

2) Indeks Reformasi Birokrasi



Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi

Birokrasi 2020-2024, dimana antara lain telah mengatur penajaman tujuan, sasaran serta program pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada dua isu yakni isu hulu yang dinamakan Reformasi Birokrasi General dan isu hilir yang dinamakan Reformasi Birokrasi Tematik sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyesuaian terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi sebelumnya berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 233 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2024 yang substansinya selaras dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tersebut. Adapun tujuan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing, mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik dengan indikator tujuan yaitu indeks Reformasi Birokrasi, dan angka kemiskinan Provinsi dan pertumbuhan investasi.

Sedangkan sasaran strategis Reformasi Birokrasi yaitu:

- a) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif sebagai aspek *hard element* dengan indikator tujuan:
 - Indeks SPBE;
 - Capaian Akuntabilitas Kinerja.
- b) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional sebagai aspek *soft element* dengan indikator tujuan:
 - Nilai Survey Indeks BerAKHLAK;
 - Nilai Survei Penilaian Integritas;
 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi level mikro, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memilih melaksanakan seluruh dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan berupa kegiatan utama dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang bersifat *mandatory*.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 maka evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengalami perubahan. Penilaian dilakukan terhadap Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik melalui evaluasi dan kolaborasi dengan Instansi Meso.

Adapun komponen evaluasi Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- a) Dimensi Reformasi Birokrasi General:
 - Capaian strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
 - ✓ Sub Komponen Kualitas rencana aksi
 - ✓ Sub Komponen Implementasi rencana aksi
 - Capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi
 - ✓ Sasaran strategis terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif dengan indikator penilaian capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi:

- Indeks SPBE
- Capaian Akuntabilitas Kinerja
- Capaian Akuntabilitas Keuangan

Dengan capaian implementasi kebijakan percepatan Reformasi Birokrasi yaitu:

- Presentase penyederhanaan struktur organisasi
 - Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi
 - Transformasi Layanan Digital
 - Tingkat Maturitas SPIP
 - Tingkat Keberhasilan Pembangunan zi
 - Nilai SAKIP
 - Indeks Perencanaan Pembangunan
 - Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
 - Tingkat Digitalisasi Arsip
 - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 - Indeks Pengelolaan Aset
 - Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
 - Indeks Kualitas Kebijakan
 - Indeks Reformasi Hukum
 - Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Indeks Tata Kelola Pengadaan
- ✓ Sasaran strategis 2 “terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional” dengan indicator penilaian capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi:
- Survei Penilaian itegritas
 - Survei Kepuasan Masyarakat
 - Indeks BerAKHLAK
 - *Employer Branding*

Dengan indikator capaian implementasi kebijakan percepatan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- Indeks Sistem Merit (integrasi dengan tingkat penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional, tingkat implementasi manajemen talenta ASN, tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN, Indeks profesionalitas ASN dan indeks NSPK)
- Indeks Pelayanan Publik (integrasi IPP dengan tingkat kepatuhan standard pelayanan publik oleh Ombudsman RI)

Tabel 2.33: Indeks Reformasi BIrokrasi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Indeks Reformasi Birokrasi	59,95	61	56,78	93,08

Sumber Data: Kementerian PANRB Tahun 2023

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana terjadi penurunan nilai dari tahun 2022 yang sebesar 64,89 menjadi 56,78 pada tahun 2023.

Dari hasil evaluasi tersebut walaupun ada beberapa penilaian yang turun tetapi ada juga nilai yang naik bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Adanya indikator baru yang menjadi penilaian salah satunya adalah indeks Reformasi Hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi skor penilaian dimana untuk indeks Reformasi Hukum tidak mendapat nilai atau 0 (Nol) hal tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan sosialisasi akan pentingnya penilaian indeks tersebut lewat pengisian dalam aplikasi oleh Kanwil Hukum dan HAM sehingga data yang diinput dalam aplikasi sangat minim bertepatan dengan waktu pengisian dilakukan saat aplikasi akan ditutup.

Sedangkan untuk Survei Standar Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terlambat menyampaikan laporan sehingga mendapatkan nilai 0 (Nol).

Hasil Evaluasi Komponen Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik:

a) Komponen Reformasi Birokrasi General Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 2.34: Komponen Reformasi Birokrasi General Provinsi Sulawesi Utara

NO	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEKS	TIM PENILAI
1	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB Genera	3	1.96	1.96	Tim Penilai Nasional
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	79.07	3.01	Tim Penilai Nasional
2	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2	Kementerian Dalam Negeri
		Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,8	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	2,43	1,94	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,5	0,43	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas
		Nilai Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	68,39	2,74	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas
		Indeks Perencanaan Pembangunan	2,5	83,88	2,1	Kementerian PPN/Bappenas - Biroren
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2		0	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"

NO	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEKS	TIM PENILAI
		Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	41,74	1,25	Arsip Nasional Republik Indonesia
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	1	0,5	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
		Indeks Kualitas Kebijakan	2	10	0,2	Lembaga Administrasi Negara
		Indeks Reformasi Hukum	2		0	Kementerian Hukum dan HAM
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	1,78	0,71	Badan Pusat Statistik
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	76,67	1,15	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Indeks Sistem Merit	4	330	3,22	Komisi Aparatur Sipil Negara
		Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,2	1,26	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	97,18	1,46	Ombudsman Republik Indonesia
3	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	2,3	4,14	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"
		Capaian IKU Makro	2	98	1,96	Tim Penilai Nasional
		Capaian IKU Non Makro	8	87,5	4,8	Tim Penilai Nasional
		Opini BPK	5	5	5	Badan Pemeriksa Keuangan
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	71,6	2,86	Badan Pemeriksa Keuangan
		Indeks BerAkhlak	4	60,8	2,43	Kementerian PANRB c.q. Deputi SDMA
		Survei Penilaian Integritas	10	72,75	7,28	Komisi Pemberantasan Korupsi
		Survei Kepuasan Masyarakat	8		0	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

b) Komponen Reformasi Birokrasi Tematik

Tabel 2.35: Komponen Reformasi Birokrasi Tematik

NO	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEKS	KET
1	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38	Tim Penilai Nasional
		Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4			Tim Penilai Nasional
		Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4			Tim Penilai Nasional
		Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4			Tim Penilai Nasional
		Laju Inflasi (Rencana Aksi)	0,4			Tim Penilai Nasional
		Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	100	0,57	Tim Penilai Nasional
		Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6			Tim Penilai Nasional
		Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6			Tim Penilai Nasional
		Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6			Tim Penilai Nasional
		Laju Inflasi (Capaian Output)	0,6			Tim Penilai Nasional
2	Capaian Dampak RB Tematik	Penurunan Tingkat Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	0,5	0,5	Tim Penilai Nasional
		Peningkatan Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3			
		Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,13	2,13	
		Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3			
KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEKS	KET
RB General	Koefisien	Koefisien	10			Tim Penilai Nasional
RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Tingkat Inflasi (Capaian Dampak)	3			Tim Penilai Nasional

Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 yaitu dengan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi reformasi birokrasi tahun sebelumnya antara lain sebagai berikut:

- a) Telah melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi serta memetakan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dimana hal tersebut dilihat dari peningkatan nilai indeks sistem merit.
- b) Telah melakukan aktivitas pembacaan nilai dasar ASN BerAKHLAK pada setiap apel hari senin di seluruh perangkat daerah berdasarkan surat

Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nomor 060/23.8334/SEKR-RO-ORG, hal Pembacaan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK.

Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan melalui program prioritas antara lain sebagai berikut:

- a) Program penataan organisasi;
- b) Program pemerintahan dan otonomi daerah;
- c) Program fasilitasi dan koordinasi hukum;
- d) Program kepegawaian daerah; dan
- e) Program pengembangan sumber daya manusia.

Program pelaksanaan reformasi birokrasi diimplementasikan melalui rencana aksi reformasi birokrasi general berdasarkan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama dan reformasi birokrasi tematik sebagaimana yang sudah dimasukkan dalam Portal RB, tetapi dalam pelaksanaan diperhadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan adanya perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada penyusunan rencana aksi dimana penetapan target atas kegiatan utama belum sepenuhnya didasarkan pada baseline tahun sebelumnya terlebih dengan adanya indeks baru yang belum ada baseline tahun sebelumnya menjadi kendala dalam penetapan target karena belum mengetahui dasar perhitungan dan pengukuran untuk menetapkan target yang akan dicapai.
- b) Terbatasnya anggaran di beberapa perangkat daerah menyebabkan rencana aksi yang ditetapkan tidak didukung dengan anggaran yang memadai.
- c) APIP/Tim Penilai Internal belum sepenuhnya mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi untuk memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu diperbaiki.

Adapun upaya yang akan dilakukan ke depan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dan kolaborasi, dan sinergi lebih intens lagi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar tidak terjadi silo Organisasi;
- b) Melakukan monitoring capaian rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik;
- c) Melakukan identifikasi permasalahan dan rekomendasi pada setiap indikator penilaian;
- d) Mendorong kepada Perangkat Daerah koordinator yang indikator penilaiannya tidak dievaluasi untuk melakukan koordinasi secara intens dengan instansi yang menjadi leading sector penilai.
- e) Penguatan Tim Reformasi Birokrasi pada semua perangkat daerah.

3) Indeks SPBE



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan SPBE didasarkan atas pemantauan serta evaluasi dan hasilnya dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan juga digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu. Disamping itu juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan dan mendukung tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan daerah serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas serta terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Tabel 2.36: Tingkat Kematangan SPBE

TINGKAT KEMATANGAN SPBE			
TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS PROSES		TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS TEKNIS	
1. Rintisan	Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .	1. Informasi	Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
2. Terkelola	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.	2. Interaksi	Layanan SPBE dalm bentuk informasi dua arah
2. Terstandarisasi	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.	3. Transaksi	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
3. Terintegrasi dan Terukur	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.	4. Kolaborasi	Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain
4. Optimum	Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.	5. Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Sumber Data: Kementerian PANRB Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, dimana hasil indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar 2,30. Hasil ini masih di bawah dari target RPJMD 2021-2026 pada tahun 2023 sebesar 3,3 atau hanya terealisasi sebesar 69,70 persen dan hanya menunjukkan kinerja **Cukup**. Namun jika dibandingkan dengan RPJMD 2021-2026 pada tahun 2022 sebesar 2,28 dimana ada peningkatan sebesar 0,02. Selanjutnya hasil capaian tahun 2023 sebesar 2,30 masih di bawah rata-rata nasional sebesar 2,79.

Tabel 2.37: Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023

SULAWESI UTARA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	2022	2023		
Indeks SPBE	3,00	3,3	2,30	69,70

Sumber Data: Kementerian PANRB Tahun 2023

Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk peningkatan pembangunan SPBE dilaksanakan melalui program strategis antara lain sebagai berikut:

- a) Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b) Program pengelolaan aplikasi informatika;
- c) Program penyelenggaraan statistik sektoral;
- d) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Beberapa permasalahan dalam pembangunan SPBE di Provinsi Sulawesi Utara antara lain:

- a) Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga belum dapat disusun dokumen penting yang menjadi dasar pelaksanaan SPBE di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu rencana pembangunan TIK;
- b) Belum terlaksananya rapat-rapat tim koordinasi SPBE sehingga dokumen bukti dukung yang dimasukkan belum memenuhi kriteria dan diterima sebagai bukti dukung yang dapat dipercaya.

2. Akuntabilitas Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Kinerja sasaran strategis yang dicapai selama tahun 2023 didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian masing-masing sasaran strategis dapat berjalan dengan baik dengan dukungan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.992.072.166.093.- yang realisasinya pada akhir tahun sebesar Rp. Rp1.773.234.989.962.- atau sebesar 89,01 persen. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran strategis Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat sebesar 111,59 persen sedangkan penyerapan anggaran terkecil, ada pada sasaran Meningkatkan Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 72,28 persen.

Tabel 2.38: Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	887.690.318.280	641.640.063.738	72,28
2.	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	164.489.187.430,00	183.551.198.500,00	111,59
3.	Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas	154.500.353.745,00	171.641.832.215,00	111,09
4.	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	7.528.426.278,00	7.507.712.352,00	99,72
5.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	777.863.880.360,00	768.894.183.157,00	98,85
	TOTAL	Rp1.992.072.166.093	Rp1.773.234.989.962	89,01

Sumber Data: BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran pada setiap sasaran strategis. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran strategis dianggap sebagai efisiensi apabila target capaian dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang telah direncanakan. Dari lima sasaran strategis terdapat satu sasaran strategis yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut, yaitu Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, dengan capaian kinerja sebesar 105,77 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 0,30 persen;

Efisiensi anggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan standar belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.